



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2024

KOLABORASI DAN AKSELERASI MENYONGSONG SWASEMBADA PANGAN



www.pertanian.go.id



LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2024

Diterbitkan oleh



Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2024

TIM PENYUSUN:

Pengarah

Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
(Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian)

Penanggung Jawab

Dr. Ir. Ketut Kariyasa, M.Si.
(Kepala Biro Perencanaan)

Ketua

Zainul Azmi, S.P., M.Ec., M.SE., Ph.D.
(Ketua Kelompok Pemantauan Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Pertanian)

Sekretaris

Mirza Sativa, S.P., M.Si.

Anggota

Akbar Choer, S.Pt.
Adi Nurahmat, S.S., M.M.
Handi Wiranata, S.Kom., M.M.
Ruri Sitaresmi, S.P.
Ermawati, S.Kom.
Mugi Hidayat, S.ST.
Murtasih, S.E.
Nur Rokhmah Fitriani, S.P.

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Segala bentuk penggandaan, penerjemahan, atau memproduksi baik melalui media cetak maupun elektronik harus seizin penerbit, kecuali untuk kutipan ilmiah.



PENGANTAR MENTERI PERTANIAN



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kementerian Pertanian dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2024 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, atas kinerja yang telah dilakukan. Laporan ini merupakan refleksi atas upaya dan capaian kita dalam menghadapi tantangan sektor pertanian sepanjang tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan bagi sektor pertanian Indonesia. Dampak fenomena *El Niño* dan perubahan iklim global telah mempengaruhi produksi pangan nasional. Sebagai respons, Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa program utama diantaranya pompanisasi, optimalisasi lahan rawa (OPLA), dan pengembangan padi gogo. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengantisipasi potensi krisis pangan yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca ekstrem.

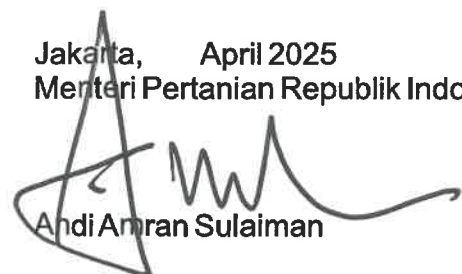
Melalui program pompanisasi, kita berupaya mengatasi kekeringan yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia dengan menyediakan fasilitas pompa air yang memadai guna menyerap air dari sungai-sungai yang berdekatan dengan areal sawah. Optimalisasi lahan rawa dilakukan untuk menata kembali pengelolaan air sehingga rawa yang biasa ditanami padi selama satu kali, dapat meningkat Indeks Pertanaman (IP)-nya. Sementara itu, pengembangan padi gogo difokuskan pada integrasi dengan tanaman kelapa sawit atau kelapa pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan.

Kita patut bersyukur, upaya-paya tersebut membuahkan hasil yang positif. Meskipun menghadapi tantangan *El Niño*, produksi padi nasional pada tahun 2024 mencapai 53,14 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 30,62 juta ton beras, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini relatif kecil mengingat kondisi cuaca yang kurang mendukung, menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan mampu mempertahankan stabilitas produksi pangan nasional. Disamping itu, pemerintah pun terus mendorong peningkatan investasi khususnya pada subsektor peternakan guna mendukung program unggulan pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya akselerasi investasi tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana beberapa investor domestik dan luar negeri berkomitmen untuk mengembangkan usaha sapi perah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan susu mendukung program MBG.

Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para petani, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi semua pihak dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih baik di masa mendatang. Mari kita terus bekerja bersama, berinovasi, dan beradaptasi menghadapi tantangan demi mewujudkan pertanian Indonesia yang tangguh dan menyejahterakan.

Jakarta, April 2025
Menteri Pertanian Republik Indonesia



Andi Amran Sulaiman



Daftar Isi

	Halaman
Pengantar Menteri Pertanian	i
Daftar isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2024	1
1.1. Arah Pembangunan Pertanian: Penguatan Fondasi menuju Swasembada Pangan	2
1.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian	3
1.3. Strategi Kementerian Pertanian	4
BAB II POTRET MAKRO PERTANIAN	7
2.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian	8
2.2. Ekspor Impor Produk Pertanian	8
2.3. Perkembangan Nilai Tukar Petani	10
2.4. Tenaga Kerja Sektor Pertanian	11
2.5. Investasi Sektor Pertanian	12
2.5.1. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	12
2.5.2. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13
2.6. Kinerja Produksi Komoditas Strategis 2020-2024	14
2.6.1. Padi	14
2.6.2. Jagung	14
2.6.3. Cabai	15
2.6.4. Bawang Merah	16
2.6.5. Bawang Putih	17
2.6.6. Daging	18
2.6.7. Susu	18
2.6.8. Telur	19
BAB III KINERJA KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024	21
3.1. Sub Sistem Hulu	22
3.1.1. Optimasi Lahan Rawa	22
3.1.2. Irigasi Pertanian dan Irigasi Perpompaan	24
3.1.3. Investasi Sapi Perah	26
3.2. Sub Sistem <i>On Farm</i>	28
3.2.1. Mekanisasi Pertanian	29
3.2.2. Stabilisasi Pasokan Komoditas Penyumbang Inflasi	30
3.2.3. Bantuan Benih mendukung Luas Tambah Tanam	33





	Halaman
3.3. Sub Sistem Hilir	33
3.3.1. Program Biosolar B50 menuju Mandiri Energi	34
3.4. Sub Sistem Pendukung	38
3.4.1. Brigade Pangan dan Petani Milenial	38
3.4.2. Standardisasi Instrumen Pertanian	48
3.4.3. Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian	52
3.4.4. Perjanjian dan Kesepakatan Strategis di Tahun 2024	55
3.5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran	58
BAB IV KEBIJAKAN AKSELERATIF	61
4.1. Sentralisasi Penyuluh Pertanian	62
4.2. Koordinasi Lintas Sektor	65
4.2.1. Koordinasi Bersama TNI-POLRI	65
4.2.2. Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga	66
BAB V PENUTUP	69
LAMPIRAN	75





Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Tantangan Pembangunan Pertanian	2
Gambar 2. Masalah dan Solusi Cepat Peningkatan Produksi Padi 2024	4
Gambar 3. Kegiatan Utama dan Pendukung Tahun Anggaran 2024	4
Gambar 4. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2024	8
Gambar 5. Neraca Perdagangan Produk Pertanian Segar dan Olahan Tahun 2020-2024(Rp Triliun)	9
Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani 2020-2024	10
Gambar 7. Perkembangan Jumlah Tenaga Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	11
Gambar 8. Perkembangan Investasi PMA Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	12
Gambar 9. Perkembangan Investasi PMDN Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	13
Gambar 10. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2020-2024	14
Gambar 11. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2020-2024	15
Gambar 12. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2020-2024	16
Gambar 13. Produksi Bawang Merah Tahun 2020-2024	16
Gambar 14. Produksi Bawang Putih Tahun 2020-2024	17
Gambar 15. Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024	19
Gambar 16. Progress Pekerjaan Oplah di Salah Satu Lokasi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan	24
Gambar 17. Kegiatan irigasi Perpompaan Kementerian Pertanian	25
Gambar 18. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan launching Biodiesel 50 persen (B50) di Pabrik Biodiesel PT. Jhonlin Agro Raya, Batulicin, Kalimantan Selatan	35
Gambar 19. Proses Bisnis Brigade Pangan Tahun 2024	39
Gambar 20. Proses Pembentukan Brigade Pangan Tahun 2024	40
Gambar 21. Alur Proses Pendampingan Brigade Pangan (BP)	42
Gambar 22. Peran Penyuluh Pusat di Provinsi dalam Pendampingan Brigade Pangan	42
Gambar 23. Kegiatan Koordinasi Brigade Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2024	43
Gambar 24. Jumlah Petani di Indonesia berdasarkan Umur Versi BPS Tahun 2023	44
Gambar 25. Kegiatan Mentan bersama Petani Milineal di Dadahup-Kalteng 27 September 2024	45
Gambar 26. Tahapan Penyusunan Rancangan RSNi	49





	Halaman
Gambar 27. Sebaran Pendampingan Lembaga Penerap Standar tahun 2024	50
Gambar 28. Sebaran Kegiatan Penerap Standar tahun 2024	51
Gambar 29. Lokasi dan Komoditas <i>ICARE</i> di 9 Provinsi	52
Gambar 30. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	54
Gambar 31. Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	55
Gambar 32. Penghargaan <i>Top Digital Awards</i> tahun 2024	56
Gambar 33. Kementerian Pertanian Raih <i>Bhumandala Awards</i> Tahun 2024	56
Gambar 34. Penyerahan Penghargaan <i>Anindhita Wistara Data</i>	57
Gambar 35. Sertifikat dan Piagam Terbaik I Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024	57
Gambar 36. Kegiatan Sekolah Lapang yang diinisiasi oleh Penyuluh Pertanian	63
Gambar 37. Rancangan Kelembagaan Penyuluh Pertanian dan Tata Hubungan Kerja Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	64
Gambar 38. Nilai IKPA Kementan 2020-2024	70





Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2020-2024	18
Tabel 2. Produksi Telur Tahun 2020- 2024	20
Tabel 3. Sebaran Desain Optimasi Lahan Tahun 2024	23
Tabel 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Tahun 2024	31
Tabel 5. Lokasi Kawasan Pengembangan Aneka Cabai Tahun 2024	32
Tabel 6. Sebaran Brigade Pangan Tahun 2024	41
Tabel 7. Contoh Pola Kemitraan Brigade Pangan	41
Tabel 8. Rekapitulasi DPM/DPA dan jaringan Petani Nasional (JPN) Tahun 2024	45
Tabel 9. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2024	54
Tabel 10. Produksi Beras Januari-Desember 2018-2024 dan Januari-Maret 2025 KSA BPS (Ton)	69





Lampiran

Halaman

Lampiran 1. RSNI3 yang diusulkan oleh BSIP yang telah ditetapkan menjadi SNI oleh BSN pada tahun 2024.	74
--	----





#petaniIndonesia





BAB I

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2024

1.1. Arah Pembangunan Pertanian: Penguatan Fondasi menuju Swasembada Pangan

Sebagai bagian akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan di tengah upaya pemulihan pasca pandemic *COVID* yang terjadi pada awal tahun 2020 serta tantangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan RPJMN 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 memiliki tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, sehingga Kementerian Pertanian turut berkontribusi menyukseskan upaya pemerintah tersebut. Dukungan Kementerian Pertanian dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Disisi lain pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang cukup masif, seperti perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan, dan alih fungsi lahan. Hal ini mendorong pemerintah harus mendesain arah pembangunan yang dapat menjawab tantangan dan isu permasalahan yang terjadi.



Gambar 1. Tantangan Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing sektor pertanian. Langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2024 merupakan fondasi untuk mengakselerasi berbagai upaya strategis dalam rangka mencapai sasaran utama yaitu mewujudkan swasembada pangan, khususnya pada komoditas strategis seperti padi dan jagung, serta mempercepat transformasi sektor pertanian melalui modernisasi dan inovasi teknologi.

Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui perluasan lahan tanam, optimalisasi lahan rawa dan lahan kering, serta pemanfaatan teknologi pertanian presisi. Selain itu, kebijakan penguatan sistem irigasi dengan program pompanisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier terus diperluas untuk meningkatkan indeks pertanaman. Upaya diversifikasi pangan juga terus digenjut untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan memperkuat peran komoditas lokal.





Selain itu, pembangunan pertanian berkelanjutan tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada praktik pertanian ramah lingkungan, efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, serta penerapan sistem pertanian berbasis Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP). Dengan strategi ini, diharapkan produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dan kesejahteraan petani dapat lebih terjamin.

1.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian

Kementerian Pertanian menetapkan berbagai kebijakan strategis guna memastikan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai, peningkatan produksi dan produktivitas, penguatan hilirisasi, serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian.

Dalam aspek penyediaan sarana dan prasarana, Kementerian berupaya meningkatkan akses petani terhadap benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian yang lebih modern. Selain itu, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, terutama melalui program pompanisasi dan jaringan irigasi tersier, terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanaman sepanjang tahun. Dukungan akses pembiayaan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema asuransi pertanian, juga diperluas guna mendorong investasi di sektor pertanian.

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, Kementerian mengimplementasikan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta memperkuat penelitian dan pengembangan guna menghasilkan varietas unggul dan teknologi pertanian yang lebih adaptif. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta mitigasi dampak perubahan iklim menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

Di sisi hilirisasi dan pemasaran, pemerintah memperkuat sistem distribusi pangan agar harga tetap stabil dan pasokan terjaga. Program pengembangan agroindustri berbasis korporasi petani terus didorong guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas pasar ekspor melalui penerapan standar mutu dan sertifikasi internasional. Selain itu, kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknologi, memperkuat peran penyuluh pertanian, serta mendorong regenerasi petani muda melalui program wirausaha muda pertanian.

Dalam menghadapi dinamika dan isu strategis terutama dalam rangka peningkatan produksi padi, pada tahun 2024 Kementerian Pertanian melakukan beberapa kebijakan penting terkait penyediaan pupuk, pompanisasi menghadapi kekeringan, optimalisasi lahan rawa dan integrasi padi gogo dengan kelapa sawit/kelapa pada tanaman belum menghasilkan.



Kebijakan peningkatan produksi padi yang diambil oleh Kementerian Pertanian diantaranya penyediaan pupuk, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan integrasi padi gogo - kelapa sawit



Gambar 2. Masalah Dan Solusi Cepat Peningkatan Produksi Padi 2024

1.3. Strategi Kementerian Pertanian

Untuk memastikan kebijakan pembangunan pertanian dapat diimplementasikan secara efektif, Kementerian Pertanian menerapkan berbagai strategi yang mencakup sektor hulu, *on-farm*, hilir, dan pendukung. Pada sektor hulu, Kementerian Pertanian fokus pada: 1) peningkatan produksi benih dan bibit unggul; 2) optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; serta 3) penguatan sistem logistik benih dan pupuk. Sementara itu, pada sektor *on-farm*, strategi yang diterapkan meliputi :1) intensifikasi pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman; 2) mekanisasi pertanian, serta 3) pengelolaan air irigasi yang lebih efektif guna meningkatkan produktivitas.

Di sektor hilir, upaya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian terus diperkuat, termasuk mendorong pemasaran digital dan meningkatkan daya saing produk ekspor melalui standarisasi dan sertifikasi mutu. Sektor pendukung juga menjadi perhatian utama dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi, fasilitasi akses pembiayaan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani.



Gambar 3. Kegiatan Utama dan Pendukung Tahun Anggaran 2024



Sebagai bagian dari strategi implementasi, Kementerian Pertanian juga melakukan *refocusing* anggaran untuk memastikan penggunaan dana lebih efektif dan tepat sasaran. Refocusing anggaran dilakukan untuk mendukung program utama perepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung dengan memperkuat kegiatan pompanisasi, penyediaan benih unggul, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Secara rinci kegiatan refocusing anggaran mendukung upaya peningkatan produksi padi dan jagung meliputi:

- *Refocusing* internal dan eksternal unit kerja mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam (PAT), optimalisasi lahan rawa, mekanisasi, perbaikan sistem pengairan, serta penguatan kelembagaan dan SDM pertanian;
- *Refocusing* untuk pompanisasi air sungai peningkatan luas tanam padi;
- *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan kebutuhan benih padi dan sarana pendukungnya
- *Refocusing* belanja pegawai dan optimalisasi sisa kontrak yang ditujukan untuk peningkatan produksi padi dan jagung, optimasi lahan rawa, serta pompanisasi, sehingga kebutuhan benih pada berbagai jenis lahan dapat terpenuhi hingga Desember 2024
- *Refocusing* mendukung kegiatan optimalisasi lahan rawa tahun 2025 melalui penyusunan SID di tahun 2024

Dengan berbagai kebijakan dan strategi yang telah dirancang, Kementerian Pertanian optimis bahwa tahun 2024 akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong sektor pertanian Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

MENGENAL TANAM CULIK

Solusi Percepat Produksi Padi

Tanam culik merupakan salah satu solusi percepatan produksi padi dimana proses penanam dilakukan segera atau bersamaan dengan masa panen padi. metode tanam yang satu ini, merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan manajemen waktu pertanaman dan pemanfaatan hujan dimana kondisi air relatif mencukupi.





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Panen Serentak di 14 Provinsi **Langkah Strategis Menuju** **Swasembada Pangan**



Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id



BAB II

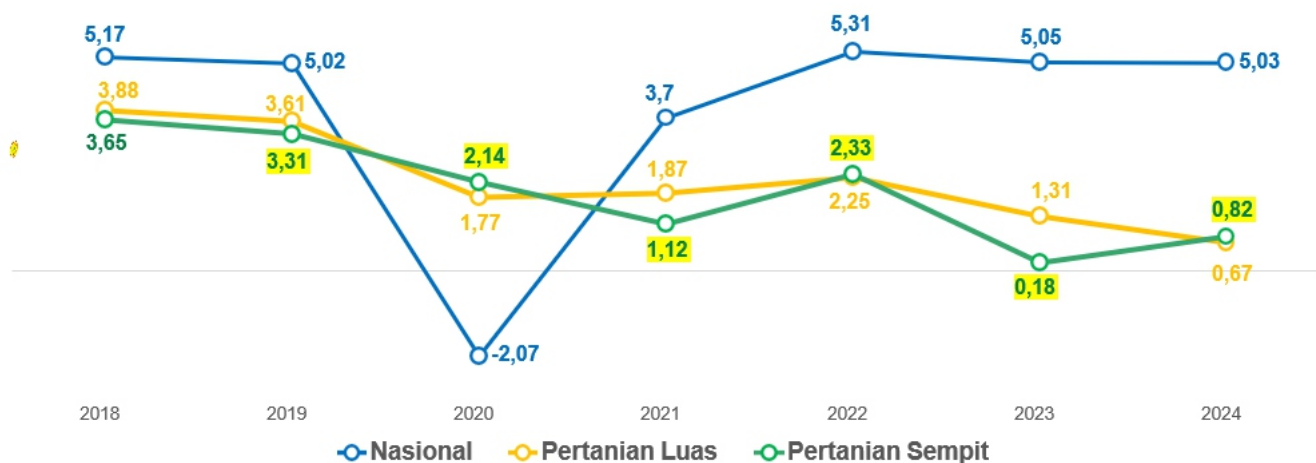
POTRET MAKRO PERTANIAN

2.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian

Dinamika global yang terjadi serta, upaya pemulihan perekonomian Indonesia, sektor pertanian tetap tumbuh berkontribusi positif terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Perekonomian Indonesia tumbuh *solid* di atas 5 persen (*y on y*). Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 tumbuh 5,03 persen (*c-to-c*). Sektor pertanian, sebagai salah satu leading sector juga menunjukkan tren pertumbuhan positif pada tahun 2024. Pertumbuhan sektor pertanian mencapai 0,67 persen (*c-to-c*), sedangkan pertanian sempit mencapai 0,82 persen (*c-to-c*).

Pertumbuhan sektor pertanian disumbang oleh subsektor peternakan yang tumbuh dengan capaian 2,78 persen, didorong oleh peningkatan produksi unggas dalam negeri dan peningkatan permintaan luar negeri untuk produk ternak unggas dan hasilnya. Subsektor tanaman hortikultura juga tumbuh mencapai 0,85 persen, ditopang oleh peningkatan produksi terhadap beberapa komoditas buah dan sayuran.

Sektor pertanian berada di posisi 5 besar pada distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2024 dengan distribusi sebesar 9,52%. Data ini tercatat bersamaan dengan lapangan usaha lain seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Dari sisi lapangan usaha pada triwulan IV 2024 (*y on y*), seluruh lapangan usaha tumbuh positif.



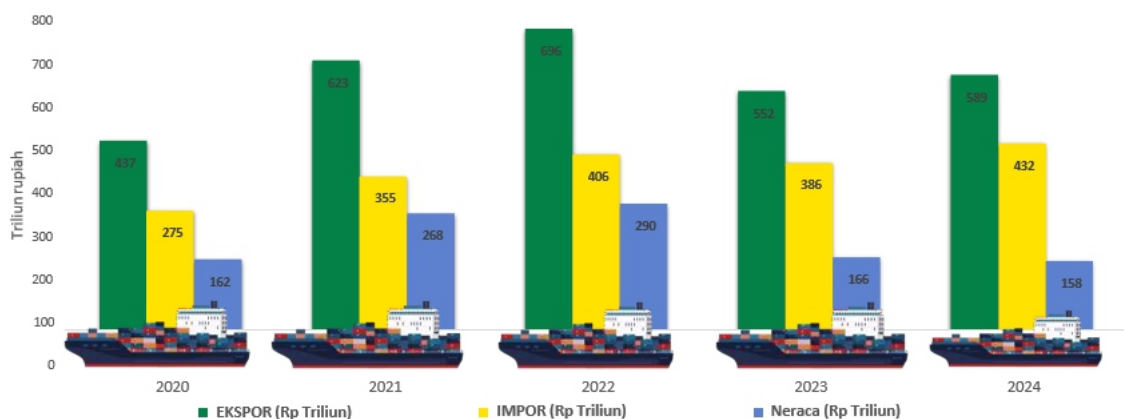
Gambar 4. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2024

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian terus mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian melalui optimalisasi lahan rawa, perluasan tanam padi gogo di perkebunan kelapa, serta peningkatan produksi benih hortikultura. Selain itu, program sinergi nasional diperkuat untuk mendukung swasembada pangan, khususnya produksi padi dan jagung. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, serta ketahanan pangan nasional.

2.2. Ekspor Impor Produk Pertanian

Neraca perdagangan sektor pertanian baik olahan maupun segar selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan selama kurun waktu 2020-2024 sebesar 12,48%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 65,43 persen.





Gambar 5. Neraca Perdagangan Produk Pertanian Segar dan Olahan Tahun 2020-2024 (Rp Triliun)

Selama periode ini, neraca perdagangan sektor pertanian selalu mencatatkan saldo positif (surplus), yang mengindikasikan nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Nilai neraca perdagangan meningkat dari Rp162 triliun pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp290 triliun, sebelum mengalami penurunan menjadi Rp158 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika kebijakan perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas global, serta tantangan logistik akibat cuaca ekstrem dan ketegangan geopolitik yang berdampak pada kelancaran distribusi dan permintaan ekspor.

Kontribusi utama terhadap surplus neraca perdagangan berasal dari meningkatnya ekspor sub sektor perkebunan, yang secara konsisten mendominasi kinerja perdagangan pertanian. Meskipun demikian, sub sektor lain seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan masih menunjukkan defisit neraca, menandakan perlunya peningkatan daya saing dan substitusi impor pada komoditas tertentu.

neraca perdagangan sektor pertanian selalu mencatatkan saldo positif (surplus), yang mengindikasikan nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor.

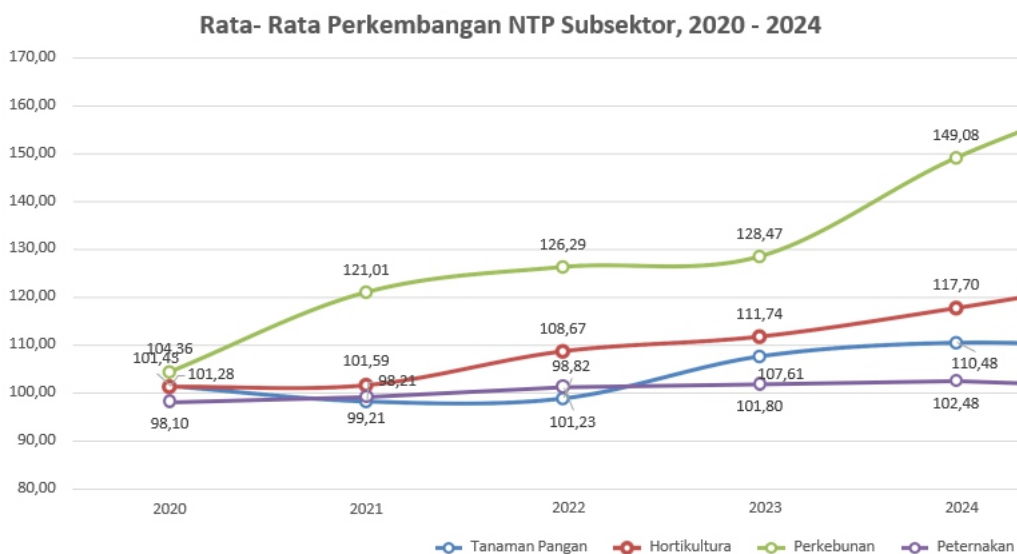




2.3. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Berdasarkan Gambar 6 selama periode 2020 hingga 2024, seluruh subsektor pertanian menunjukkan tren positif dengan fluktuasi yang bervariasi. Nilai NTP di semua subsektor berada di atas angka 100 sejak 2022, yang menandakan bahwa petani pada umumnya mengalami surplus, yaitu pendapatan yang diterima lebih besar dari pengeluaran untuk konsumsi maupun produksi.



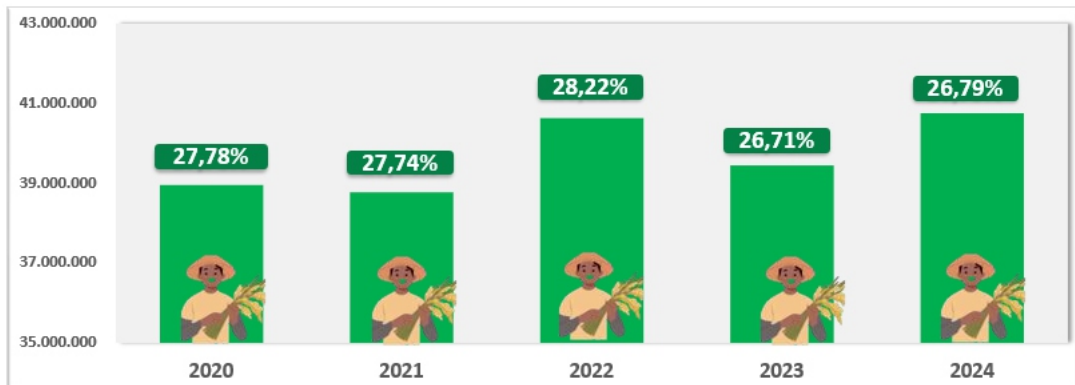
Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani 2020 - 2024

Pada tahun 2024, seluruh subsektor pertanian menunjukkan kinerja positif dengan NTP yang berada di atas angka 100, mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Subsektor perkebunan mencatat lonjakan tertinggi dengan NTP mencapai 149,08, menandakan tingginya daya saing dan nilai tambah komoditas ekspor. Hortikultura terus menunjukkan pertumbuhan stabil hingga mencapai NTP 117,70, didorong oleh permintaan pasar yang kuat dan produktivitas yang terjaga. Tanaman pangan mengalami peningkatan yang konsisten hingga mencapai 110,48, mengindikasikan perbaikan pendapatan petani dan efisiensi biaya produksi. Sementara itu, meskipun peternakan tumbuh lebih lambat, tetap berada pada posisi surplus dengan NTP 102,48, mencerminkan kondisi usaha tani ternak yang masih mampu memberikan keuntungan bagi peternak.



2.4. Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Selama 5 tahun terakhir (2020-2024), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata-rata 27,43%. *Share* ini setara dengan 39,72 juta pekerja di Sektor Pertanian, dari total 144,77 juta jiwa angkatan kerja.



Gambar 7. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

Pertanian merupakan sektor lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar yang mencapai 40,76 juta orang pada Agustus 2024. Jumlah ini merupakan 26,79% dari jumlah tenaga kerja Indonesia. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus Tahun 2023 sebesar 35,45 juta orang, maka angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,31%. Tenaga kerja tersebut tersebar ke dalam empat subsektor yaitu di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki daya tarik yang kuat sebagai sumber mata pencaharian, terutama di daerah pedesaan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran sektor pertanian tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ke depan, penguatan kapasitas, modernisasi pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan sektor ini.

Peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki daya tarik yang kuat sebagai sumber mata pencaharian, terutama di daerah pedesaan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran sektor pertanian tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.



2.5. Investasi Sektor Pertanian

2.5.1. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian selama lima tahun terakhir mencerminkan minat investor asing terhadap potensi sektor ini di Indonesia. Selama periode 2020–2024, nilai investasi PMA menunjukkan fluktuasi tahunan dengan tren yang cenderung meningkat. Pada 2022, investasi mulai stabil dan tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023 mencatat nilai investasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencerminkan minat investor asing yang kuat. Sementara itu, tahun 2024 tetap menunjukkan performa positif dengan nilai investasi yang kembali menguat di akhir tahun, menandakan optimisme terhadap sektor pertanian Indonesia.

PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI PMA TRIWULANAN (RP TRILIUN), 2020-2024



Gambar 8. Perkembangan Investasi PMA Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

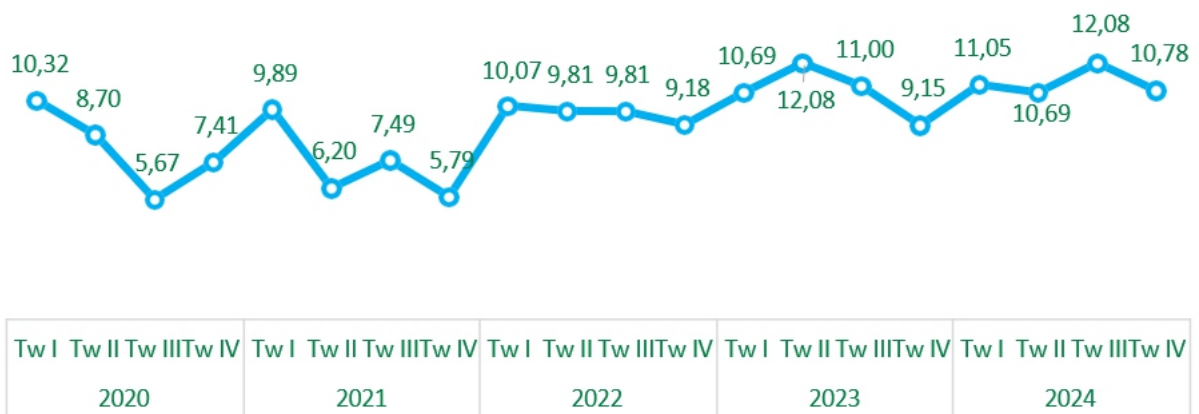
Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi daya tarik bagi investor asing dan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh di masa depan. Dukungan terhadap iklim investasi yang kondusif, didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong produktivitas dan keberlanjutan, akan semakin memperkuat kepercayaan investor. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta permintaan global yang terus meningkat, sektor pertanian Indonesia diproyeksikan tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.



2.5.2 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor pertanian selama lima tahun terakhir mencerminkan komitmen yang konsisten dari investor domestik dalam mendukung pembangunan sektor ini. Dalam periode tahun 2020-2024 nilai investasi PMDN menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, nilai investasi mulai meningkat di tahun 2021 dan terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian tertinggi mencapai Rp12,08 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 investasi pertanian PMDN pada Triwulan IV tumbuh sebesar 17,77% dibandingkan periode yang sama Tahun 2023.

PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI PMDN TRIWULANAN (RP. TRILIUN), 2020-2024



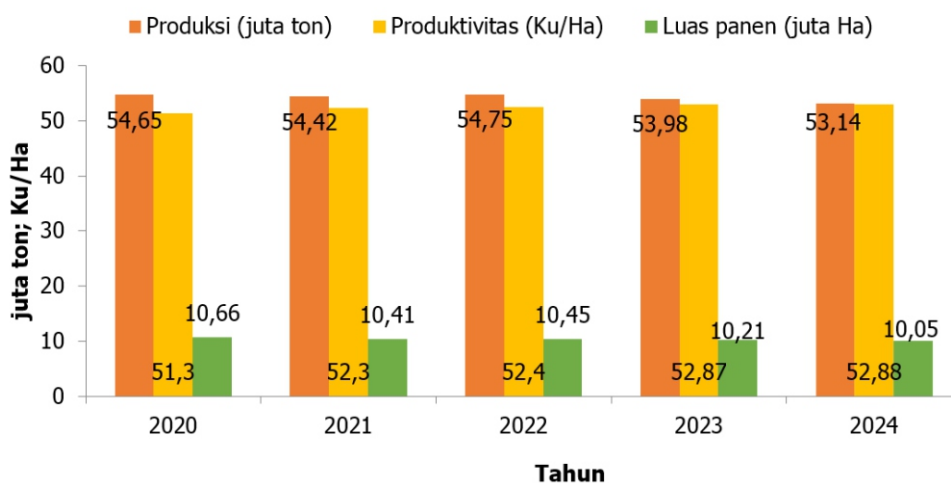
Gambar 9. Perkembangan Investasi PMDN Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

Hal ini menunjukkan kepercayaan yang kuat dari pelaku usaha dalam negeri terhadap potensi sektor pertanian. Capaian ini menjadi indikasi bahwa sektor pertanian terus menjadi salah satu prioritas investasi strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.

2.6. Kinerja Produksi Komoditas Strategis 2020-2024

2.6.1. Padi

Berdasarkan angka tetap KSA BPS per tanggal 3 Februari 2025, produksi padi tahun 2024 adalah 53,14 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2024 ini mengalami penurunan 1,55% dari produksi Tahun 2023 yaitu sebesar 53,98 juta ton GKG. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2020- 2024) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Penurunan luas panen dan produksi padi terjadi tahun 2020 dan 2021, dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan namun kembali menurun di tahun 2023 dan 2024 dengan rata-rata penurunan dalam 5 tahun terakhir untuk luas panen sebesar 1,46% dan produksi sebesar 0,69%. Meskipun dari sisi produksi dan luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas padi selama lima tahun terakhir menunjukkan positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,78%. Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada Gambar 10.



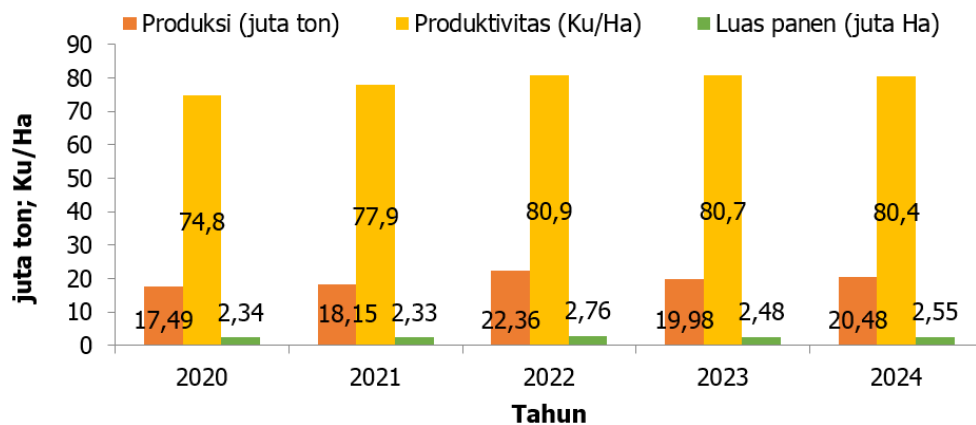
Gambar 10. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2020-2024

Produksi beras dalam negeri tahun 2024 mencapai 30,62 juta ton, turun 1,54% dibanding 2023. Sementara itu, konsumsi nasional diproyeksikan 30,91 juta ton, menyebabkan defisit 29 ribu ton. Penurunan produksi akibat cuaca kering berkepanjangan mendorong impor beras hingga 4 juta ton. Ketidakseimbangan ini berpotensi memengaruhi harga dan ketahanan pangan, sehingga diperlukan strategi seperti peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan pengelolaan stok cadangan untuk mengurangi ketergantungan impor.

2.6.2. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2024 (dengan kadar air 28%) mencapai 20,48 juta ton yang dihitung berdasarkan KSA BPS. Produksi tahun 2024 mengalami peningkatan 2,47% terhadap produksi 2023. Gambar dibawah memperlihatkan bahwa produksi, produktivitas dan luas panen jagung mengalami fluktuasi selama 2020- 2024.





Gambar 11. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2020-2024

Perkembangan produksi jagung tahun 2020-2024 menunjukkan terjadi fluktuasi baik pada luas panen, produktivitas, maupun produksi. Luas panen dan produksi mengalami peningkatan pada tahun 2022, kemudian menurun pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi, luas panen, produksi dan produktivitas jagung tetap menunjukkan tren yang positif dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan luas panen sebesar 2,71%, produktivitas sebesar 1,83% dan produksi sebesar 4,71%.

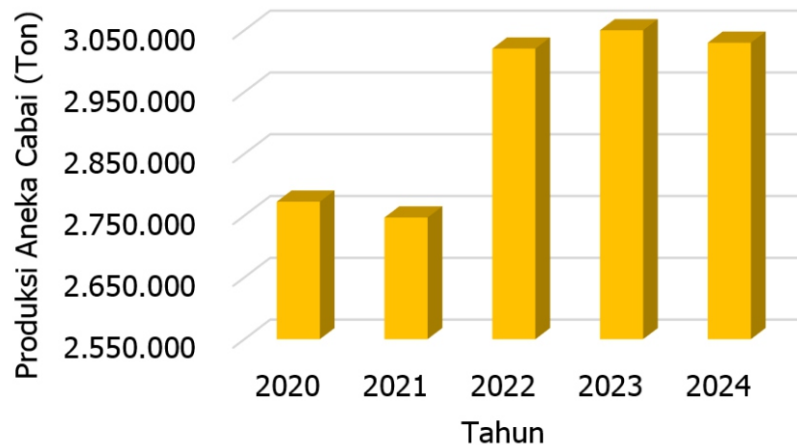
Adanya dukungan yang diberikan pemerintah terhadap pencapaian produksi jagung, berkontribusi terhadap jumlah produksi jagung nasional. Total bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada Ditjen Tanaman Pangan untuk tahun 2024 seluas 1,1 juta ha diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap luas tanam jagung nasional tahun 2024 sebesar 0,90 juta ha. Dari total luas tanam bantuan tersebut diperkirakan memberikan sumbangan sebesar 0,87 juta ha terhadap total luas panen nasional dan 1,65 juta ton GKG terhadap produksi jagung nasional (8,03%).

2.6.3 Cabai

Produksi cabai pada tahun 2024 sebesar 3,03 juta ton turun 1,03% dibanding produksi tahun 2023 sebesar 3,06 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami penurunan produksi 5,77% dan cabai rawit mengalami peningkatan sebesar 3,87%. Perkembangan produksi cabai nasional dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Produksi cabai rawit pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,87%, sedangkan cabai besar mengalami penurunan produksi 5,77%.



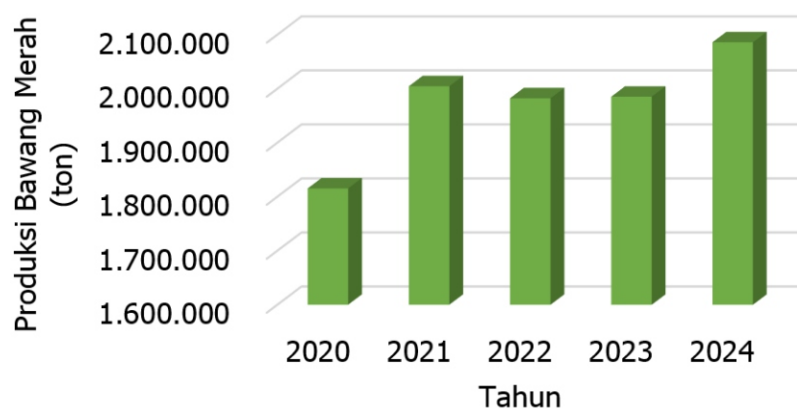


Gambar 12. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2020 – 2024

Upaya peningkatan produksi aneka cabai di berbagai daerah menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura strategis menjadi faktor penting dalam memperluas kampung hortikultura di beberapa wilayah. Selain itu, ketersediaan air untuk sistem pengairan di daerah sentra cabai masih bergantung pada curah hujan, sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya air yang optimal. Dalam aspek pertanaman, kondisi tanaman cabai yang kurang optimal di beberapa lokasi menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, dukungan permodalan yang memadai bagi petani dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan usaha pertanian cabai serta meningkatkan kesejahteraan petani.

2.6.4. Bawang Merah

Produksi bawang merah pada tahun 2024 sebesar 2,09 juta ton meningkat 5,07% terhadap produksi tahun 2023 sebesar 1,99 juta ton. Perkembangan produksi bawang merah nasional dalam periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



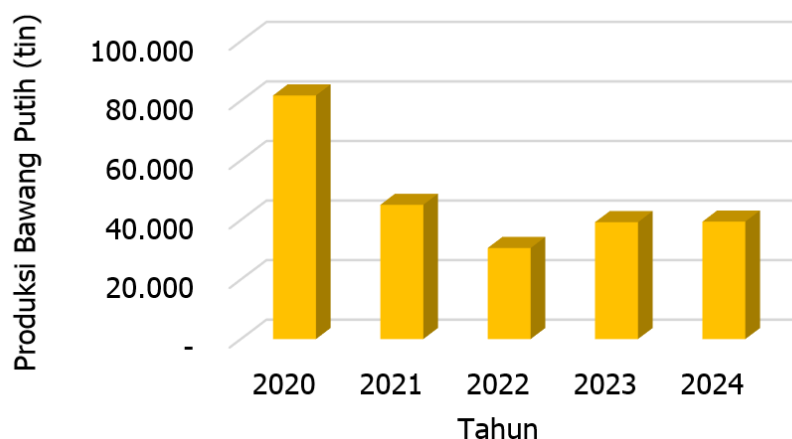
Gambar 13. Produksi Bawang Merah Tahun 2020 – 2024



Produksi bawang merah tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dalam pengelolaannya. Perubahan iklim seperti *El Nino* dan bencana hidrometeorologi mempengaruhi jadwal tanam serta kondisi pertumbuhan tanaman di daerah sentra. Penggunaan pestisida yang kurang bijak juga menjadi perhatian dalam praktik budidaya, mengingat efektivitasnya terhadap hama serta dampaknya terhadap kesehatan petani. Stabilitas harga yang belum terjamin dapat mempengaruhi keputusan petani dalam memilih komoditas yang akan dibudidayakan. Selain itu, serangan hama dan penyakit pada tanaman bawang merah menunjukkan pentingnya penerapan teknik budidaya yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan modal dan pola persemaian yang belum optimal di beberapa daerah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

2.6.5. Bawang Putih

Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2024 mencapai 39.44 ton atau mengalami peningkatan 0,48% dari produksi tahun 2023 sebesar 39.254 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 14. Produksi Bawang Putih Tahun 2020 – 2024

Produksi bawang putih nasional mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir setelah pada periode 2020-2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan produksi yang cukup besar dimulai pada tahun 2021 yaitu sebesar 44,88% dibandingkan tahun 2020. Meskipun produksi bawang putih tahun 2024 mengalami peningkatan, upaya pengembangannya masih menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Program wajib tanam bawang putih yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri mengalami kendala dalam implementasinya, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha. Perubahan kebijakan yang mengizinkan wajib tanam setelah penerbitan RIPH menyebabkan tingkat kepatuhan menurun dibandingkan sebelumnya. Selain itu, berbagai faktor seperti keterlambatan distribusi sarana produksi, kualitas benih yang belum optimal, serta hambatan dalam pemasaran dan pembayaran turut mempengaruhi efektivitas program ini. Untuk memastikan keberlanjutan pengembangan bawang putih dalam negeri, diperlukan strategi yang lebih terarah, termasuk peningkatan efisiensi sistem budidaya, penguatan dukungan kepada petani, serta kebijakan yang mendorong daya saing bawang putih lokal di pasar domestik.

2.6.6. Daging

Pada tahun 2024 total produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk meatyield tercapai sebesar 4.744,76 ribu ton, meningkat 129,35 ribu ton dibanding tahun 2023. Berdasarkan tabel dibawah, dapat dilihat bahwa peningkatan produksi daging tahun 2024 terjadi pada komoditas ternak sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik, sedangkan penurunan produksi daging terjadi pada komoditas ternak domba dan babi. Peningkatan produksi daging untuk komoditas utama tersebut diiringi juga dengan terpenuhinya populasi ternak untuk komoditas utama yang dikembangkan yaitu sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi sesuai kebutuhan.

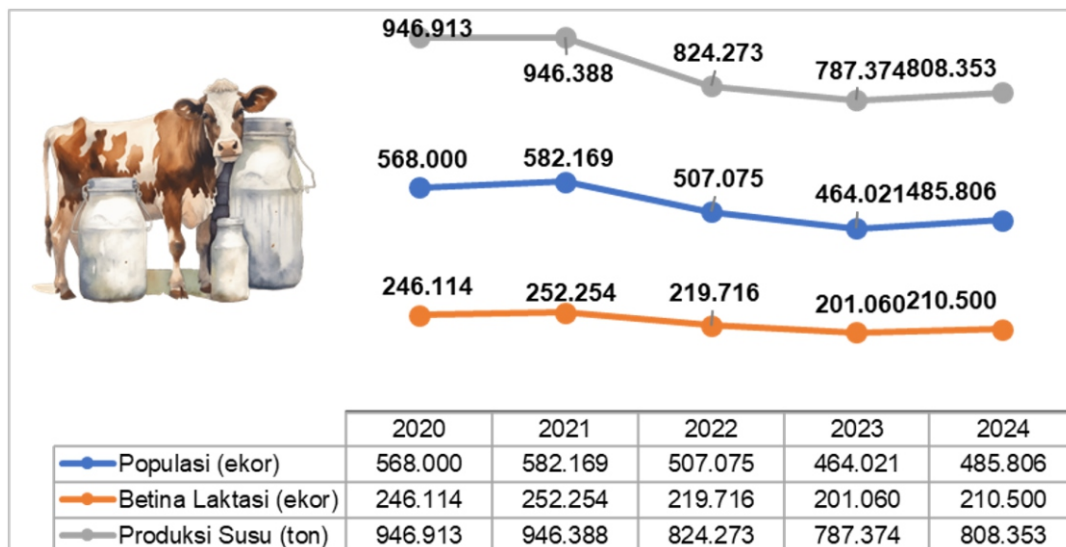
Tabel 1. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2020-2024

NO	PRODUKSI	2020	2021	2022	2023	2024
	Daging	4,147.17	4,132.40	4,560.60	4,615.41	4,744.76
1	Sapi (Ribuan Ton)	339.75	365.51	374.43	461.30	478.85
2	Kerbau (Ribuan Ton)	13.88	19.19	16.54	16.16	17.39
3	Kambing (Ribuan Ton)	41.86	40.52	41.22	56.34	57
4	Domba (Ribuan Ton)	37.05	34.67	35.67	48.16	34.59
5	Babi (Ribuan Ton)	189.55	175.99	102.48	134.99	130.87
6	Ayam Buras (Ribuan Ton)	270.21	269.80	276.73	143.79	156.45
7	Ayam Pedaging (Ribuan Ton)	3,219.12	3,185.70	3,668.88	3,721.64	3,835.90
8	Itik (Ribuan Ton)	35.75	41.02	44.65	33.03	33.82

Meskipun produksi daging meningkat, ketersediaan daging sapi/kerbau dalam negeri masih belum mencukupi, dengan produksi baru mencapai 64,47% dari total kebutuhan. Sebaliknya, subsektor unggas mengalami surplus, di mana produksi daging ayam ras mencapai 3,8 juta ton, melebihi kebutuhan 3,7 juta ton. Untuk meningkatkan produksi daging sapi, berbagai upaya dilakukan, seperti mendorong pembiayaan non-APBN, investasi swasta, koordinasi antar lembaga, penguatan pengawasan, serta penyusunan regulasi percepatan produksi daging nasional.

2.6.7. Susu

Pada 2024, produksi susu mencapai 808,35 ribu ton, meningkat 2,66% dari 2023 yang sebesar 787,37 ribu ton. Pertumbuhan produksi susu bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Pada 2020, produksi naik 0,25% akibat meningkatnya konsumsi selama pandemi Covid-19. Namun, pada 2022-2023, produksi menurun akibat wabah PMK yang menyebabkan kematian dan penurunan produktivitas sapi perah. Peningkatan produksi susu 2024 didukung oleh populasi 210.501 ekor sapi perah laktasi, naik 4,48% dari 201.060 ekor pada 2023. Meski mengalami peningkatan, jumlah ini masih belum mencukupi kebutuhan.



Gambar 15. Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024

Kenaikan produksi susu pada tahun 2024 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Untuk mencapai swasembada susu, diperlukan peningkatan produksi sebesar 6% per tahun. Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilakukan pada tahun 2025 guna meningkatkan produksi susu diantaranya melalui pembinaan perbibitan dan kelompok peternak, regulasi pembibitan sapi perah, serta pemasukan ternak dari AS dan Brazil untuk peningkatan mutu genetik. Kompetensi SDM perlu diperkuat melalui kerja sama dengan Denmark, sementara investasi didukung dengan kemudahan akses lahan, infrastruktur, dan pembiayaan bagi pelaku usaha.

2.6.8. Telur

Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh. Produksi telur tahun 2024 sebesar 6,88 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,42% dari tahun sebelumnya. Selama periode 2020-2024, peningkatan produksi telur berlangsung dengan fluktuasi yang beragam. Produksi telur dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Tahun 2020 permintaan telur meningkat karena telur merupakan sumber protein yang terjangkau sebagai penambah daya tahan tubuh pada saat pandemi *Covid-19*. Tahun 2021 permintaan telur menurun tetapi tahun 2022 permintaan telur meningkat sehingga produksi *Day Old Chick Final Stock (DOC FS)* ayam ras meningkat yang berdampak pada peningkatan produksi telur.

Produksi telur tahun 2024 sebesar 6,88 juta ton atau mengalami peningkatan 4,42% dari tahun sebelumnya



Tabel 2. Produksi Telur Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Ternak	Tahun					%peningkatan 2024/2023
		2020	2021	2022	2023	2024*	
1	Ayam Buras	358,86	368,7	389,27	214,73	236,65	10,21
2	Ayam Ras Petelur	5.141,57	5.156,00	5.579,25	6.116,07	6.342,71	3,71
3	Itik	316,95	313,84	316,17	200,21	236,48	18,12
4	Itik Manila	24,65	24,27	22,02	26,17	27,62	5,54
5	Puyuh	32,35	30,63	33,18	28,3	32,83	16,01
Jumlah		5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.585,49	6.876,28	

Kinerja produksi telur selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor perunggasan, namun diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Oleh karena itu Kementan terus mendorong ekspor telur tetas (*hatching egg*) serta meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, telur sebagai sumber protein hewani yang terjangkau terus dipromosikan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Untuk menjaga stabilitas ketersediaan, Kementan juga berkoordinasi dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga terkait.



Kinerja produksi telur selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor perunggasan, namun diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.



BAB III

KINERJA KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024



3.1. Sub Sistem Hulu

Dalam sistem pembangunan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan, subsistem hulu memegang peranan yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam rantai produksi. Subsistem ini mencakup berbagai komponen penunjang seperti penyediaan lahan, infrastruktur irigasi pertanian, penyediaan investasi sapi perah. Keberhasilan tahap hulu ini sangat menentukan produktivitas dan efisiensi usaha tani, sekaligus menjadi faktor penentu dalam pencapaian target ketahanan pangan nasional.

Ketersediaan dan keterjangkauan input pertanian yang berkualitas menjadi tantangan utama yang harus dihadapi, terlebih di tengah dinamika perubahan iklim, tekanan populasi, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, intervensi yang tepat melalui kebijakan peningkatan kapasitas produksi input dalam negeri dan dukungan infrastruktur serta dapat memperkuat fondasi produksi.

3.1.1. Optimasi Lahan Rawa

Optimasi Lahan (Oplah) Rawa merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lahan rawa untuk pertanian, perikanan, atau penggunaan lainnya melalui teknologi dan manajemen yang tepat. Tujuannya adalah agar lahan rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa merusak keseimbangan ekologis. Komponen Optimasi Lahan Rawa terdiri dari pengelolaan air, pemilihan komoditas yang sesuai, peningkatan kesuburan tanah, teknologi pertanian, dan konservasi lingkungan. Pemanfaatan lahan rawa, baik pasang surut maupun lebak telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian sawah, namun, belum optimal. Sebagian besar sawah di lahan rawa memiliki Indeks Pertanaman yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa terdiri dari tiga komponen kegiatan yaitu Survei Investigasi dan Desain (SID), Konstruksi Oplah, dan Olah Tanah Oplah. Alokasi kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA 2024 dilaksanakan di 12 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan. Kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut.



a. Survei Investigasi dan Desain (SID)

Penyusunan SID dilakukan untuk lokasi yang tersebar di 12 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan untuk desain lahan seluas **351.011 Ha**.

b. Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Konstruksi optimasi lahan rawa dilakukan pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan pada lahan seluas **348.758 Ha**. Rata-rata realisasi fisik 100%.

c. Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

Olah tanah optimasi lahan rawa tahun 2024 dilakukan di 12 provinsi yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan dengan luasan **267.005,18 Ha**.

Tabel 3. Sebaran Desain Optimasi Lahan Tahun 2024

No.	Provinsi	Desain SID (Ha)	Konstruksi Lahan Rawa	Olah Tanah
1.	Aceh	11.557	11.557	11.425
2.	Sumatera Utara	30.442	30.442	15.206
3.	Riau	2.690	3.336	3.336
4.	Jambi	11.011	13.874	5.053
5.	Sumatera Selatan	71.015	67.693	54.773
6.	Lampung	28.202	28.202	28.063
7.	Kepulauan Bangka Belitung	10.711	10.205	7.174
8.	Kalimantan Barat	39.153	39.153	34.493
9.	Kalimantan Tengah	51.059	51.060	29.110
10.	Kalimantan Selatan	41.523	39.589	36.231
11.	Sulawesi Selatan	13.648	13.648	13.648
12.	Papua Selatan	40.000	40.000	28.494
Total		351.011	348.758,71	267.005,180



Program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang digagas oleh Kementan semakin memperlihatkan dampak positifnya bagi petani di Kampung Telaga Sari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan

Kab. Pinrang



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Pinrang



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Wajo



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Gambar 16. Progres Pekerjaan Oplah di salah satu lokasi di Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan

3.1.2. Irigasi Pertanian dan Irigasi Perpompaan

a. Irigasi Pertanian

Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi pertanian (infrastruktur irigasi) ditingkat usaha tani secara terintegrasi dengan sumber air dari jaringan primer dan sekunder. Program ini mencakup:



- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
- Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
- Pengembangan sumber air (irigasi perpipaan/perpompaan air tanah)
- Pembangunan embung, dam parit, dan long storage

Pada Tahun Anggaran (TA) 2024, anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur irigasi melalui tugas pembantuan, dana pusat, dan dukungan manajemen

b. Irigasi Perpompaan

Kegiatan Irigasi Perpompaan merupakan salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian, dengan cara mendistribusikan air irigasi dengan menggunakan sarana pompa air sebagai penggeraknya dan saluran terbuka atau saluran tertutup sebagai sarana distribusinya, serta mendukung sub sektor tanaman pangan.

Kegiatan Irigasi Perpompaan dilakukan secara swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan melalui dana kewenangan Tugas Pembantuan (TP). Lokasi kegiatan tersebar di 33 provinsi di 335 kabupaten sebanyak 9.498 unit



Gambar 17. Kegiatan irigasi perpompaan Kementerian Pertanian



3.1.3. Investasi Sapi Perah

Kementerian Pertanian berperan dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG)—salah satu dari delapan program prioritas Presiden RI yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Fokus Kementerian Pertanian yang dilakukan adalah penyediaan pangan asal ternak seperti daging, susu, dan telur yang kaya protein hewani esensial untuk pertumbuhan dan kesehatan.

Pada tahun 2024, terjadi defisit signifikan dalam pemenuhan pangan hewani nasional. Kebutuhan susu mencapai 4,63 juta ton, sementara produksi domestik hanya 987 ribu ton (defisit 79%). Untuk daging sapi, produksi nasional sebesar 369 ribu ton hanya mencukupi 48% dari kebutuhan 774 ribu ton. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi nasional untuk mengurangi ketergantungan impor.

Untuk mengejar target tersebut, Ditjen PKH mengajak investor mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi pedaging, dengan mengandalkan lima modal dasar mencakup sumber daya kawasan dan lahan, sumber daya ternak, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta regulasi dan sinergitas kebijakan.

Selain itu diperlukan strategi percepatan yang diharapkan mampu mendorong peternakan nasional untuk lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Strategi percepatan tersebut antara lain:

- Penyelesaian regulasi pendukung;
- Penyediaan informasi dan *link and match* investasi peternakan;
- Importasi ternak, material genetik, dan produk ternak;
- Dukungan skema kredit usaha sapi, infrastruktur, mekanisasi dan digitalisasi;
- Penguatan kelembagaan dan sinergitas usaha peternakan;
- Penumbuhan dan peningkatan kapasitas usaha serta hilirisasi;
- Pemerataan pengembangan usaha peternakan; dan
- Peningkatan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.

Pernyataan Presiden
Prabowo terkait angka
kekurangan gizi anak
di Indonesia.



"Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi. Hitungannya perkiraannya hampir seperempat, 25 persen anak-anak kita mengalami kurang gizi rata-rata. Ini sangat memprihatinkan,"



MAKAN BERGIZI (MBG)
menyasar bidang gizi,
kemiskinan, pendidikan
dan ekonomi

Prabowo Subianto
Presiden ke-8 RI

Program *quick win* sebagai strategi yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil nyata dalam waktu singkat yaitu 100 hari pada pemerintahan baru menjadi upaya percepatan investasi yang signifikan Kementerian Pertanian dalam mencapai target hasil cepat yaitu:

- Penyelesaian regulasi (revisi PP 4/2016 dan turunannya);
- Penyiapan informasi lahan dan *link & match* investasi;
- Pemasukan sapi perah dan indukan sapi betina produktif dari Brazil;
- Model kerja sama investasi (B to B dan kemitraan);
- FGD antar K/L terkait dukungan percepatan investasi peternakan; dan
- Pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi.

Business Continuity Planning (BCP) investasi peternakan sapi perah dan sapi Untuk memastikan keberlanjutan investasi peternakan sapi perah dan sapi pedaging, *BCP* disusun dengan tiga pilar kebijakan

Kebijakan umum meliputi: 1) Percepatan pemasukan sapi perah dan sapi bakalan betina produktif dari negara baru; 2) Kepastian penyerapan susu oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) dan daging sapi oleh HOREKA serta mendukung program Makan Bergizi; 3) susu masuk ke dalam bapakting (bahan pokok penting); dan 4) regulasi pelabelan susu segar .

Kebijakan operasional meliputi: 1) Insentif sewa lahan dan pengelolaan limbah; 2) Penyediaan infrastruktur, logistik, hijauan pakan; 3) Fasilitasi vaksin dan obat-obatan; 4) Pengembangan mekanisasi, sistem informasi dan teknologi digital; dan 7) Pengembangan ekosistem investasi.

Kebijakan fiskal dan fasilitasi pembiayaan komersil meliputi: 1) *Tax Holiday*; 2) Kredit Usaha Sapi (KUS) bunga 3% dan *grace period* 3 tahun; 3) Bebas Bea Masuk dan PPN impor sapi; dan 4) Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Sinergi Pembiayaan Pendanaan berasal dari APBN, APBD, DAK, swasta, dan Hibah Luar Negeri (HLN). APBN/DAK difokuskan untuk infrastruktur utama, APBD untuk program lokal, swasta untuk kemitraan dan pasar, dan HLN untuk riset, inovasi, dan pelatihan. Pendekatan ini mendorong ekosistem peternakan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan.

Kebijakan umum
Kementerian Pertanian
dalam memenuhi
kebutuhan susu salah
satunya adalah
melakukan
percepatan pemasukan
sapi perah betina
produktif dari
negara baru





Aktivitas/Poin Kritis yang telah dilaksanakan:

- Revisi Regulasi:
- Penyusunan Rancangan Perpres tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN)
- Strategi percepatan realisasi inventasi dengan membentuk Tim *Task Force* dengan menyusun Rencana Aksi dan *Timeline*, melakukan FGD dengan K/L terkait.
- Penguatan Pasar dengan melakukan (1) Penyampaian Data ke BGN; (2) Koordinasi lintas K/L dengan BGN (akses pasar dan keamanan pangan); Setneg pada dukungan Perpres P2SDN; Sertifikat RPH Ruminansia; dan (3) Usulan pembiayaan melalui DAK Jangka Menengah 2026-2029
- Pemasukan Sapi dan Tindak Perkarantinaan

Selain itu, fasilitasi investasi juga dilaksanakan melalui pendampingan calon investor bidang peternakan yang berencana melakukan investasi di bidang peternakan. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon investor dimulai dari pengurusan perizinan berusaha, pencarian lahan, koordinasi dengan pemerintah daerah tempat lokasi farm, koordinasi dengan DPMPSTSP daerah, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Fasilitasi/pendampingan lanjutan PMA asal Vietnam PT TH Group. Pendampingan investor TH Group dilaksanakan di beberapa lokasi sejak bulan Oktober-Desember 2024. Lokasi yang disurvei diantaranya sebagai berikut: Napu, Sulawesi Tengah (3.594 ha), Gowa, Sulawesi Selatan (900 ha), Wajo, Sulawesi Selatan (13.458 ha), Seko Sulawesi Selatan (39.476 ha), Barito Utara, Kalimantan Tengah (10.270 ha). Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan: PT TH Group telah memutuskan investasi di 3 lokasi yaitu Napu, Wajo, dan Barito Utara.

3.2. Sub Sistem *On Farm*

Subsistem *on-farm* merupakan bagian inti dari sistem agribisnis yang mencakup seluruh kegiatan budidaya pertanian yang dilakukan langsung di lahan oleh petani. Kegiatan dalam subsistem ini mencakup pengolahan tanah, pemilihan benih unggul, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, hingga panen. Efektivitas subsistem *on-farm* sangat menentukan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, karena tahap ini merupakan titik awal terbentuknya nilai tambah dalam rantai pasok pertanian. Inovasi seperti pertanian presisi, pemanfaatan data iklim, dan mekanisasi pertanian dapat meningkatkan efisiensi pada tahap ini.



3.2.1. Mekanisasi Pertanian

Mekanisasi pertanian merupakan upaya transformasi menuju pertanian modern. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam proses budidaya, panen, hingga pascapanen, mekanisasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat waktu tanam dan panen, serta mengurangi kehilangan hasil. Di tengah tantangan ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian dan perubahan iklim yang mempengaruhi musim tanam, mekanisasi menjadi solusi strategis untuk menjaga produktivitas lahan secara optimal.

Untuk meningkatkan produksi dan mencapai swasembada pangan, mekanisasi berperan penting dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Melalui penggunaan traktor untuk olah tanah, *rice transplanter* untuk percepatan tanam padi, *combine harvester* untuk panen yang lebih cepat dan minim kehilangan, serta pompa air untuk mengatasi kendala irigasi, produktivitas lahan dapat ditingkatkan secara signifikan. Mekanisasi juga memungkinkan pertanaman ganda atau indeks pertanaman (IP) yang lebih tinggi, sehingga produksi dalam satu tahun bisa dilipatgandakan.

Dukungan program pemerintah seperti brigade alsintan, bantuan alsintan kelompok tani, dan penguatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sebagai pengelola alsintan menjadi kunci dalam memperluas penerapan mekanisasi, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Sebagaimana dilaporkan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, alat dan mesin pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan yang disalurkan pada tahun 2024 terdiri dari bantuan Traktor Roda Empat, Traktor Roda Dua, Pompa Air, *Hand Sprayer*, *Rice Transplanter*, dan *Traktor Crawler*.

Adapun jumlah alat dan mesin pertanian yang sudah disalurkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Traktor Roda-4

Telah disalurkan bantuan traktor roda 4 sebanyak **1.241 unit** di 30 Provinsi di seluruh Indonesia.

b. Traktor Roda-2

Telah disalurkan Traktor Roda 2 sebanyak **6.563 unit** di 35 Provinsi.

Traktor Roda-4, merupakan salah satu bantuan Alat pertanian yang diberikan Pemerintah Pusat ke kelompok tani melalui Kementerian Pertanian

AKSI IMPLEMENT DISC PLOW TRAKTOR RODA 4





a. Pompa Air

Dalam menghadapi bencana kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan maka Kementerian Pertanian mengambil langkah cepat melalui kegiatan pompanisasi dengan memberikan bantuan pompa air. Bantuan pompa air ini juga untuk mendukung Kegiatan Penambahan Areal Tanam (PAT) Padi dengan pemberian Pompa Air tahun 2024 sebanyak 62.388 unit di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

b. Hand Sprayer

Hand sprayer diberikan kepada petani sebanyak 20.700 unit di 33 Provinsi.

c. Rice Transplanter

Penggunaan *rice transplanter* dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi proses tanam. Dengan menggunakan mesin ini, petani dapat menanam bibit padi dalam jumlah besar dengan cepat dan tepat, serta tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding metode tradisional. Tahun 2024 penyaluran *rice transplanter* sebanyak 186 unit di 12 Provinsi.

d. Traktor Roda Crawler

Bantuan Traktor Roda *Crawler* tahun 2024 sebanyak 30 unit dialokasikan di 4 Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Sulawesi Selatan.

3.2.2. Stabilitas Pasokan Komoditas Penyumbang Inflasi

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah merupakan bagian dari strategi penyediaan pasokan komoditas hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional *volume* produksi tahunan dinilai mencukupi, distribusi antar-waktu dan antar-wilayah masih menghadapi tantangan, terutama menjelang hari besar keagamaan dan perayaan nasional yang kerap memicu lonjakan permintaan. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan ini berisiko menyebabkan gejolak harga dan memicu inflasi, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan pengendalian yang terencana oleh seluruh pemangku kepentingan.





Sebagai bagian dari upaya penguatan produksi, Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024 melaksanakan program produksi semaian cabai dan bawang merah menggunakan teknologi soilblock di 37 lokasi pada 31 provinsi, dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung melalui kegiatan nurseri. Hasil produksi nurseri berupa *seedling* telah membantu petani dalam pemenuhan kebutuhan benih, sehingga mendukung kelancaran produksi. Realisasi pengembangan kawasan bawang merah mencapai 6.551 hektare atau 105,49% dari target, dengan pelaksanaan oleh satuan kerja pusat di 6 provinsi dan 16 kabupaten mitra *Champion Bawang Merah*.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang merah di 6 Provinsi, 16 Kabupaten mitra *Champion Bawang Merah* yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang merah tahun 2024

No	LOKASI		Realisasi (Ha)
TOTAL			6.551
1.	Provinsi Sumatera Barat		494
	1	Solok	494
2.	Provinsi Jawa Barat		1.149
	1	Bandung	387
	2	Garut	215
	3	Cirebon	185
	4	Majalengka	262
	5	Indramayu	100
3.	Provinsi Jawa Tengah		3.974
	1	Brebes	2.269
	2	Kendal	340
	3	Pati	335
	4	Grobogan	225
	5	Demak	643
	6	Temanggung	142
	7	Wonosobo	20
4.	Provinsi Jawa Timur		537
	1	Nganjuk	257
	2	Probolinggo	280
5.	Provinsi Nusa Tenggara Barat		100
	1	Bima	100
6.	Provinsi Sulawesi Selatan		297
	1	Enrekang	297





Komoditas Aneka Cabai

Pengembangan kawasan aneka cabai tahun 2024 dilakukan pada lahan seluas 3.000 Ha yang tersebar di 10 Provinsi, 27 Kabupaten/Kota mitra Champion Cabai. Lokasi pengembangan kawasan aneka cabai dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 5. Lokasi kawasan pengembangan aneka cabai Tahun 2024

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota		Kawasan	Realisasi (Ha)
TOTAL				3.000
1.	Provinsi Sumatera Barat			
	1	Solok	Cabai Besar	50
2.	Provinsi Riau			
	1	Kampar	Cabai Besar	10
3.	Provinsi Jawa Barat			
	1	Sukabumi	Cabai Besar	50
	2	Cianjur	Cabai Besar	150
	3	Bandung	Cabai Besar	150
	4	Garut	Cabai Besar	150
	5	Sumedang	Cabai Besar	150
4.	Provinsi Jawa Tengah			
	1	Banjarnegara	Cabai Rawit	90
	2	Kebumen	Cabai Rawit	80
	3	Wonosobo	Cabai Rawit	30
	4	Magelang	Cabai Rawit	650
	5	Semarang	Cabai Rawit	20
	6	Temanggung	Cabai Rawit	300
5.	Provinsi DI. Yogyakarta			
	1	Kulon Progo	Cabai Rawit	100
	2	Sleman	Cabai Rawit	250



3.2.3. Bantuan Benih Mendukung Luas Tambah Tanam

Bantuan benih merupakan program pemerintah untuk memberikan benih kepada petani secara gratis atau subsidi. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen

Bantuan benih yang telah diberikan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Benih padi inbrida di 21 provinsi adalah seluas 657.845 ha
- Benih padi inbrida reprioritas di 19 provinsi adalah seluas 578.709 ha (101,53%) dari target 570.000 ha
- Benih padi inbrida opla dan pompanisasi di 27 provinsi adalah seluas 727.152 ha (100,77%) dari target 721.610 ha
- Benih padi inbrida optimalisasi di 5 provinsi adalah seluas 35.144 ha (101,49%) dari target 34.600 ha
- Benih padi inbrida (MP FE) di Kalimantan Tengah adalah seluas 11.500 ha (100,00%) dari target 11.500 ha

3.3. Sub Sistem Hilir

Subsistem hilir pertanian merupakan tahap lanjutan dari proses produksi yang berperan penting dalam menentukan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Kegiatan dalam subsistem ini mencakup penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian. Efektivitas subsistem hilir sangat menentukan kualitas produk yang sampai ke konsumen, serta berkontribusi besar dalam mengurangi kehilangan hasil (*losses*) dan menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Dengan pengelolaan hilir yang baik, produk pertanian tidak hanya dapat dipasarkan dalam bentuk segar, tetapi juga dapat diolah menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi.

Penguatan subsistem hilir menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani. Dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan skala rumah tangga maupun industri besar, peningkatan akses pasar melalui digitalisasi, serta penguatan infrastruktur logistik seperti *cold storage* dan jalan usaha tani, menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan koperasi petani dalam membangun rantai pasok yang efisien dan transparan juga sangat diperlukan agar hasil pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Hilirisasi produk pertanian merupakan salah satu fokus Pemerintah Pusat di bidang pertanian, hal ini dikarenakan penguatan hilirisasi produk pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani.





3.3.1. Program Biosolar B50 Menuju Mandiri Energi

Salah satu kegiatan Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan Kementerian ESDM yaitu "Implementasi Biosolar B50 Menuju Mandiri Energi". Program ini sejalan dengan 8 misi (Asta Cita) yang diusung Presiden RI terutama asta cita ke-2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Program biodiesel saat ini telah mencapai tahap B35, dan sedang dikembangkan ke B40. Uji jalan B40 dan B30D10 pada sektor otomotif telah dilakukan Juli–Desember 2022 dengan hasil memuaskan. Dalam rangka menuju B50, Ditjen Perkebunan sejak Juli 2024 mulai menyusun Naskah Akademik Efektivitas Organisasi Tata Kelola Kelapa Sawit bersama APPERTANI, menyiapkan regulasi pendukung mandatori B40/B50, serta melakukan kajian kesiapan sarpras badan usaha bahan bakar nabati dan *supply–demand* kelapa sawit bersama LEMIGAS. Simulasi program biodiesel B50 menunjukkan kebutuhan total Biogasoil sebesar 34,1 juta KL. Dari produksi CPO tahun 2022 sebesar 46,7 juta ton, konsumsi domestik 21 juta ton digunakan untuk menghasilkan biodiesel (B100) sebanyak 10,4 juta KL (9,3 juta ton), sedangkan alokasi ekspor 25,7 juta ton menyumbang 6,7 juta KL (5,9 juta ton). Tambahan kebutuhan dipenuhi dari solar domestik 15,3 juta KL dan solar impor 1,7 juta KL.

Dengan implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa negara yang disebabkan dari pengurangan biaya impor solar. Hasil perhitungan proyeksi penghematan devisa dari kebijakan B35 di tahun 2023 menjadi B50 pada tahun 2026 memiliki potensi kenaikan sampai 74% atau 18.2 Milyar USD = Rp 287.8 Trilyun. Untuk memenuhi kebutuhan CPO B50 penambahan sekitar 6 juta ton yang bisa didapat dari peningkatan produksi CPO nasional atau diambil dari pengurangan ekspor Rp. 92,3 Trilyun. Kesimpulannya program B50 akan menghemat devisa sebesar Rp. 195,5 Trilyun/ tahun.

a. Perkembangan B50

Progres kegiatan menuju implementasi B50 sebagai berikut :



1. Kegiatan Launching B50

Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024 bertempat Pabrik Biodiesel PT. Jhonlin Agro Raya, Batulicin, Kalimantan Selatan, diluncurkan oleh Menteri Pertanian dihadiri oleh Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Kalsel, GAPKI, APROBI, Kementerian ESDM, SUCOFINDO, BPDPKS, dan pihak terkait lainnya.



Gambar 18. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan *launching* Biodiesel 50 persen (B50) di Pabrik Biodiesel PT. Jhonlin Agro Raya, Batulicin, Kalimantan Selatan

2. Tersusunnya *Roadmap* Implementasi Biodiesel B50 Menuju Indonesia Mandiri Energi

3. Penyiapan Standard dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk campuran B50 (sedang berproses oleh LEMIGAS melalui pendanaan BPDP

- Menyiapkan standar dan mutu (spesifikasi) BBN dan melakukan pengujian karakteristik serta unjuk kerja pada mesin diesel dengan bahan bakar B50 dengan komponen campuran B100, D100 dan B0 sehingga didapatkan evaluasi teknis bahan bakar campuran B50 sebagai bahan bakar mesin diesel di Indonesia.
- Timeline* untuk penyiapan spesifikasi dan uji bench test maksimum 3 bulan dimulai dari Agustus 2025 sampai November 2025.
- Output* yang diharapkan (keluaran) yaitu :
 - Data teknis dan rekomendasi kualitas bahan bakar B100, D100, B0 dan kualitas bahan bakar campuran B50.
 - Data teknis unjuk kerja berupa daya, torsi, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar dari penggunaan B50 pada mesin diesel (otomotif dan/atau non otomotif) dengan referensi bahan bakar B0.
 - Data teknis kualitas pelumas baru (*fresh oil*), dan pelumas bekas (*used oil*) yang digunakan pada B50 pada mesin diesel dan mengetahui signifikansinya terhadap kinerja mesin.



4. Persiapan Rencana penyediaan kendaraan uji dan filter bahan bakar uji serta penyediaan bahan bakar minyak jenis minyak solar (B0); jenis biodiesel (B100) dan diesel biohidrokarbon (D100), perkembangannya sampai dengan saat ini yaitu :

Penyampaian terkait dengan kebutuhan bahan bakar, masih dapat disesuaikan berdasarkan pembahasan metodologi yang dilakukan;

- Pada pengujian *chassis dyno* perlu untuk dilakukan penyesuaian ECU dengan bahan bakar yang akan diuji melalui penggunaan kendaraan dengan jarak 200 km;
 - Pengujian dilakukan pada 2 jenis kendaraan *Light Duty* yang disediakan oleh GAIKINDO (Toyota Fortuner dan Mitsubishi L300 / Isuzu Mux);
 - Pengujian akan dilakukan untuk 2 jenis filter (kendaraan *light duty* dan kendaraan *heavy duty*).
5. Kajian Kesiapan Infrastruktur Pendukung Penerapan B50 (sedang berproses hingga saat ini oleh LEMIGAS melalui pendanaan BPDP);
6. Kajian Bisnis Proses Pengadaan dan Harga Indeks Pasar BBN Menuju B50 (sedang berproses hingga saat ini oleh LEMIGAS melalui pendanaan BPDP); dan
7. Penyusunan naskah akademik terkait efektifitas organisasi tata Kelola sawit (sedang berproses hingga saat ini oleh APPERTANI melalui pendanaan BPDP).

Upaya-Upaya Strategis

Untuk mencapai implementasi B50 pada tahun 2026 diperlukan upaya baik dari sisi hulu maupun hilir antara lain :

1. Peningkatan produktivitas Kebun Rakyat (PSR);
 - a. Peningkatan produktivitas perkebunan rakyat 1,24%/ha/tahun dari 3,36 ton/ha/tahun hingga 4,35 ton/ha melalui intensifikasi (PSR + penerapan GAP)
 - b. Peningkatan produktivitas perkebunan besar 1,47%/ha/tahun dari 4,03 ton/ha/tahun hingga mencapai 5,24 ton/ha melalui intensifikasi.
 - c. Ekstensifikasi perkebunan rakyat (PR) melalui optimalisasi HGU yang sudah terbit dan memanfaatkan alih komoditas, dari 6,8 juta ha menjadi 9,5 juta ha pada tahun 2032 sehingga total luas areal kelapa sawit nasional menjadi 20 juta ha.

“Ini gagasan besar, Bapak Presiden sekarang dan Bapak Presiden terpilih, Indonesia menjadi lumbung pangan dan mandiri energi. Dua kekuatan ini bisa menggetarkan dunia,”
-Amran Sulaiman-



2. Peningkatan Luas Lahan (sesuai Studi Analisis dibutuhkan 3 Juta Ha lahan tambahan);
3. Peningkatan Produksi B50 melalui Peningkatan Kapasitas Terpasang Pabrik. Peningkatan kapasitas terpasang Pabrik/ Industri Biodiesel harus melalui pembangunan Pabrik baru (membutuhkan waktu sekitar 2 tahun baru implementasi) dan dibutuhkan investasi sekitar Rp. 7 triliun. Selain itu mendorong penambahan kapasitas terpasang atau investasi baru terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
4. Mendorong BU BBN eksisting untuk meningkatkan kemampuan produksi secara optimal ($\pm 85\%$ dari kapasitas terpasang)
5. Pengujian Standar Kualitas Mesin Kendaraan melalui *Road Test* Penggunaan B50;
6. Perlu adanya kenaikan tarif subsidi atau insentif biodiesel;

Selain itu, diperlukan regulasi terkait hal-hal penting yaitu :

1. Penetapan Areal Lahan Baru Pengembangan Biodiesel (KLHK, ATR/BPN, Kementan)
2. Kewajiban Optimalisasi Lahan IUP dan HGU yang dikuasai oleh Korporasi (Kementan, KLHK, ATR/BPN)
3. Revisi kebijakan mandatori Blending Biodiesel dan Penetapan standar kualitas B50 (Kemen-ESDM).
4. Ketetapan pemerintah terkait produk biodiesel yang dipakai untuk blending (tingkat persentase *blending FAME* dan *HVO*)
5. Peningkatan Kapasitas Terpasang Industri Biodiesel (BKPM)
6. Penyesuaian tarif insentif biodiesel (Kemenkeu, BPDPKS)
7. Penentuan Harga konversi memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi BU BBN;
8. Penetapan sanksi B0 yang tidak serta merta mematikan BU BBN;
9. Komitmen pemerintah melindungi BU BBN dalam kepastian dan perlindungan hukum.
10. Kajian komprehensif mengantisipasi terjadinya distorsi pasar yang dapat menjatuhkan daya saing industri kelapa sawit;
11. Kebijakan yang kuat dalam mendorong peningkatan produksi CPO nasional.

Biodiesel B50 merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi karbon. B50 juga dapat menjadi solusi untuk kemandirian energi nasional.





3.4. Sub Sistem Pendukung

Sebagai bagian akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan di tengah upaya pemulihan pasca *pandemic COVID* yang terjadi pada awal tahun 2020 serta tantangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan RPJMN 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 memiliki tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, sehingga Kementerian Pertanian turut berkontribusi menyukseskan upaya pemerintah tersebut.

3.4.1. Brigade Pangan dan Petani Milenial

BRIGADE PANGAN

Tantangan ketahanan pangan Indonesia semakin mendesak seiring dengan proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk ini berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan, terutama pangan pokok seperti padi. Program Brigade Pangan menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan dan efisien. Brigade Pangan bertujuan untuk memodernisasi pertanian melalui penerapan teknologi pertanian *modern*, mekanisasi, digitalisasi, dan penggunaan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Program ini berfokus pada pemberdayaan petani milenial untuk mengelola usaha tani dengan lebih efisien, serta meningkatkan akses mereka terhadap permodalan dan pasar.

Pada tahun 2024, BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) menjalankan program ini dengan berbagai capaian utama, termasuk penguatan kapasitas petani dan penyuluh, serta optimalisasi penggunaan teknologi pertanian presisi. Brigade Pangan juga memperkenalkan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan pemangku kepentingan lain. Program ini menyediakan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, pestisida, serta alat mekanisasi pertanian dan alat panen. Dengan total biaya operasional sekitar Rp2,5 miliar untuk pengelolaan 200 hektar per tahun, proyeksi pendapatan mencapai Rp4,2 miliar, dengan keuntungan bersih sekitar Rp1,68 miliar per tahun dan pendapatan petani sekitar Rp10 juta per bulan. Dengan model bisnis ini, Brigade Pangan tidak hanya mendukung produktivitas pertanian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil usaha yang berkelanjutan dan optimal.

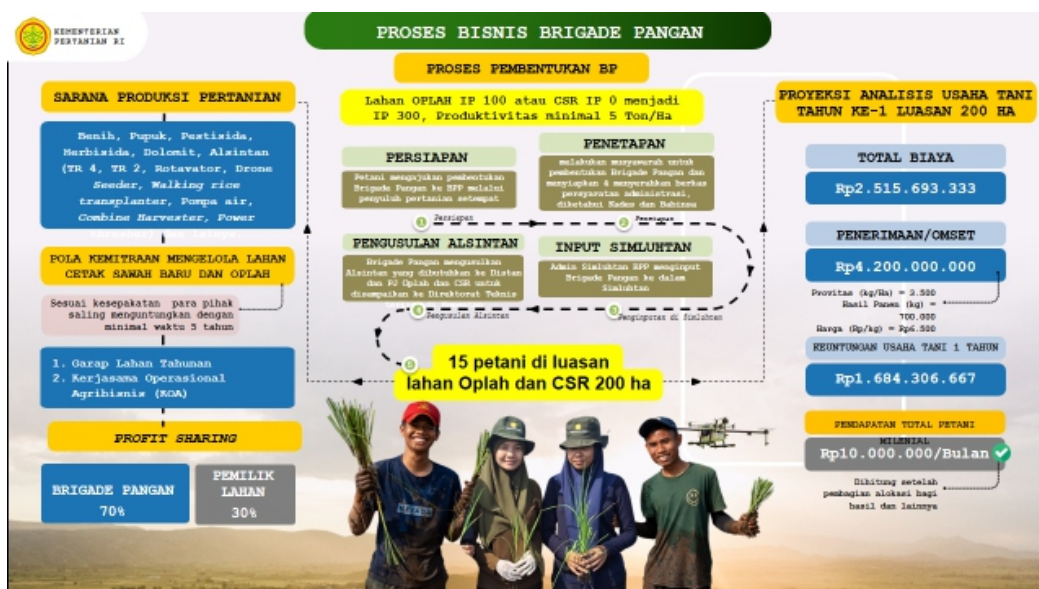


Dengan berbagai capaian tersebut, Brigade Pangan diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjaga kestabilan harga pangan di dalam negeri. Dengan pendekatan yang berbasis pada inovasi, optimalisasi sumber daya lahan dan air, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, program ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan ketahanan pangan Indonesia secara mandiri dan berkelanjutan.

a. Membentuk Brigade Pangan (BP) sebagai Salah Satu Upaya Pertanian *Modern*

Brigade Pangan merupakan kelembagaan Usaha Pertanian yang beranggotakan Petani Milenial. Brigade Pangan ditumbuhkembangkan oleh Petani menggunakan prinsip penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Petani. Brigade Pangan dikukuhkan oleh Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Brigade Pangan dalam mengelola Usaha Pertanian dengan luasan kurang lebih 200 Ha dapat bermitra dengan kelembagaan Petani dan/atau kelembagaan ekonomi Petani yang sudah ada. Selain berasal dari kelembagaan Usaha Pertanian, Brigade Pangan dapat berasal dari kelompok masyarakat lain. Dalam hal kelembagaan Usaha Pertanian berasal dari TNI/Polri milenial, pelaksanaan bantuan mengikuti peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara.

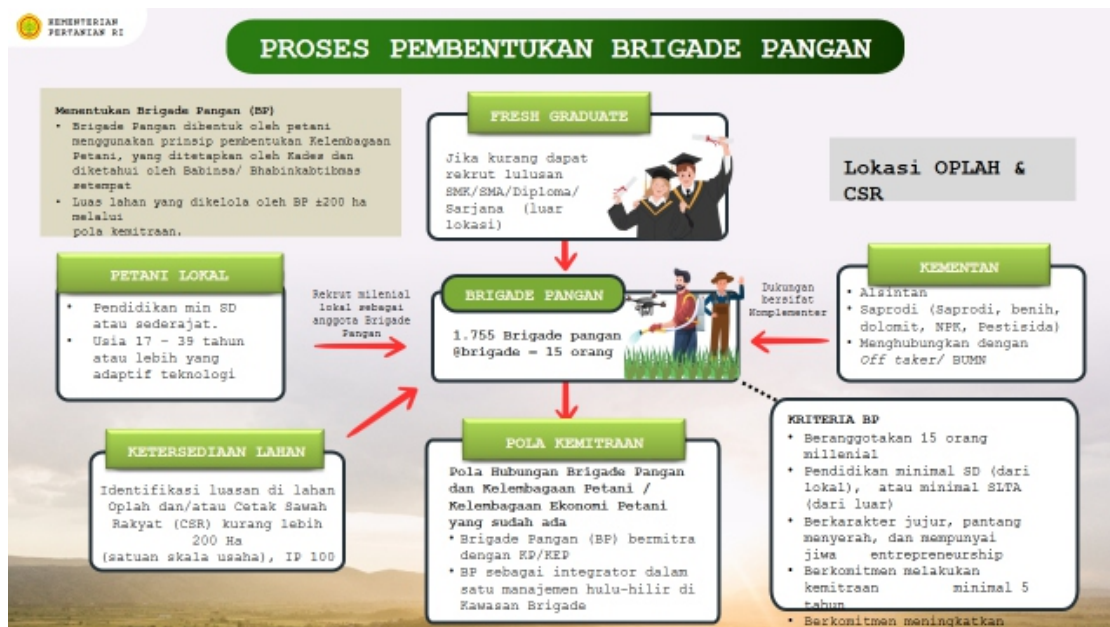
Tujuan utama pembentukan Brigade Pangan untuk menjadi wadah kebersamaan Petani Milenial dalam mengelola usaha tani. Penerapan melalui Pertanian *Modern* menempatkan generasi milenial di garis depan pengelolaan dan operasional pertanian, dengan tujuan untuk memodernisasi sektor pertanian dan menarik minat generasi muda dalam bidang ini. Proses bisnis Brigade Pangan terlihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Proses bisnis Brigade Pangan Tahun 2024

Brigade Pangan menyediakan berbagai sarana produksi pertanian, termasuk benih unggul, pupuk, pestisida, dolomit, alat mekanisasi pertanian, serta alat panen. Pola kemitraan dalam mengelola lahan melibatkan Garap Lahan Tahunan, dan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Dengan sistem ini, pemilik lahan mendapatkan keuntungan 30%, sementara Brigade Pangan memperoleh 70% dari hasil usaha.

Total Biaya Operasional: Rp2.515.693.333, Pendapatan/Omset: Rp4.200.000.000, Keuntungan Bersih per Tahun: Rp1.684.306.667, dan Pendapatan Petani per Bulan: Rp10.000.000. Sistem ini memastikan keberlanjutan usaha tani dengan hasil yang optimal serta kesejahteraan petani yang lebih baik. Dengan model bisnis ini, sebanyak 15 petani dapat mengelola lahan seluas 200 hektar secara produktif dan berkelanjutan. Proses Pembentukan Brigade Pangan terlihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Proses Pembentukan Brigade Pangan Tahun 2024

Lokasi Brigade Pangan (BP) terdapat di 12 (dua belas) Provinsi meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan. Total Luas OPLAH tahun 2024 adalah 351.017 Ha. Capaian Brigade Pangan yang telah terbentuk adalah 102,51% dimana realisasi BP yang terbentuk adalah 1.799 BP dari target BP (200ha/15 orang) 1.755 BP. Capaian Brigade Pangan Per Provinsi pada Tabel 6.

Program Brigade Pangan menekankan pada pemberdayaan petani, terutama petani milenial, dan melibatkan mereka dalam proses produksi dan hilirisasi.





Tabel 6. Sebaran Brigade Pangan Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah BP
1	Aceh	67
2	Riau	19
3	Jambi	77
4	Sumatera Selatan	325
5	Sumatera Utara	159
6	Lampung	140
7	Kep.Bangka Belitung	54
8	Kalimantan Selatan	210
9	Kalimantan Tengah	257
10	Kalimantan Barat	209
11	Sulawesi Selatan	71
12	Papua Selatan	211
TOTAL		1.799

Sumber. Sekretariat Badan, Tahun 2024

Brigade Pangan menyediakan berbagai sarana produksi pertanian, termasuk benih unggul, pupuk, pestisida, dolomit, alat mekanisasi pertanian, serta alat panen. Pola kemitraan dalam mengelola lahan melibatkan Garap Lahan Tahunan, dan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Dengan sistem ini, pemilik lahan mendapatkan keuntungan 30%, sementara Brigade Pangan memperoleh 70% dari hasil usaha.

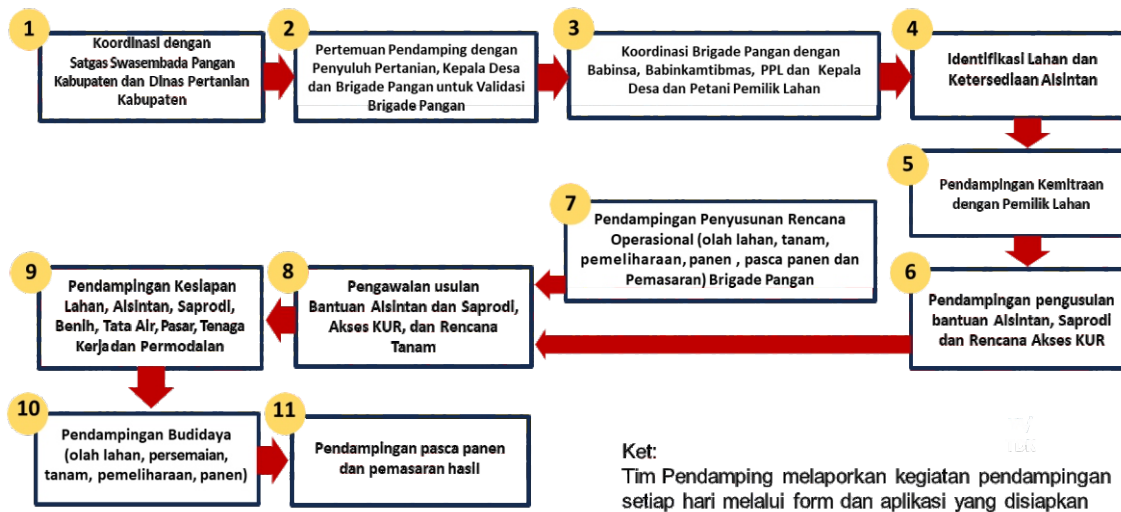
Pola Kemitraan BP sesuai kesepakatan para pihak saling menguntungkan dengan minimal waktu 5 (lima) tahun bisa dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Contoh pola kemitraan Brigade Pangan

NO	POLA KEMITRAAN	KONTRIBUSI		PROFIT SHARING (%)		SKALA USAHA (HA)	KETERANGAN
		BP	POKTAN PEMILIK	BP	PEMILIK LAHAN		
1.	Garap Lahan Tahunan	Benih, pupuk, herbisida, pestisida, jasa alsintan, upah tenaga kerja, jaminan pasar	Lahan	70	30	±200	Untuk lahan OPLAH dan CSR, IP 100 menuju IP 300
2.	Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)	Benih, pupuk, herbisida, pestisida, alsintan, tenaga kerja, dan jaminan pasar,	Lahan, tenaga kerja (olah lahan, pemeliharaan, panen)			±200	Lahan OPLAH. IP 100 menuju IP 300 Keuntungan dibagi setelah biaya masing-masing dikembalikan; bagi hasil sesuai kesepakatan (Lahan Existing)

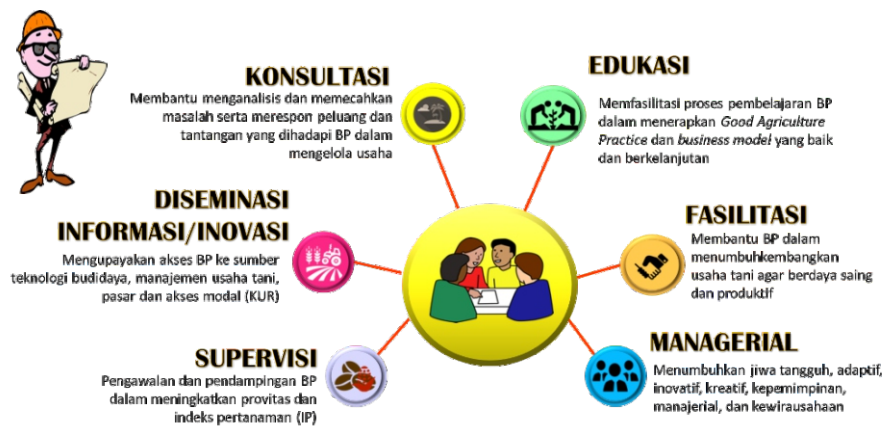


Alur Proses Pendampingan Brigade Pangan (BP) Tahun 2024 pada Gambar 21.



Gambar 21. Alur Proses pendampingan Brigade Pangan (BP)

Adapun peran penyuluh pusat di Provinsi dalam pendampingan Brigade Pangan (BP) Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Peran penyuluh pusat di Provinsi dalam pendampingan Brigade Pangan (BP)

Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi generasi millennial di sektor pertanian melalui pembentukan Brigade Pangan dengan maksud melakukan regenerasi petani, menyediakan lapangan kerja, dan melibatkan SDM unggul dalam implementasi pertanian modern.



Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Kementerian Pertanian

**PELATIHAN
SEJUTA PETANI
DAN PENYULUH
GERAKAN ANTISIPASI
DARURAT PANGAN NASIONAL**

05 - 07 JUNI 2024



Kegiatan koordinasi dalam rangka Brigade Pangan di Provinsi Jambi, Tahun 2024 bersama Instansi terkait dapat di lihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Kegiatan koordinasi Brigade Pangan di Provinsi Jambi, Tahun 2024

PETANI MILENIAL

Regenerasi sumber daya manusia pertanian yang berkesinambungan, profesional, dan adaptif terhadap teknologi menjadi kunci untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Petani milenial, yang berusia antara 17 hingga 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi digital, memiliki potensi besar untuk menjadi pengusaha pertanian yang inovatif. Kementerian Pertanian mendukung generasi muda ini melalui penyediaan teknologi, bantuan alsintan, bibit gratis, serta pendampingan untuk mengembangkan sektor pertanian yang lebih modern dan produktif. Dengan pengolahan yang menggunakan teknologi canggih, nilai tambah komoditas pertanian bisa meningkat hingga 200%.

Tantangan terbesar adalah mengajak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian yang memiliki tantangan tersendiri. Namun, dengan semangat, energi, dan pemikiran kritis yang dimiliki oleh generasi muda, pertanian dapat menjadi sektor yang lebih menguntungkan. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Indonesia akan mengalami bonus demografi besar pada tahun 2050, menjadikan sektor pertanian sebagai peluang untuk menyediakan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan utama rumah tangga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program Petani Milenial, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019, bertujuan untuk mendorong lebih banyak generasi muda terlibat dalam sektor pertanian. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 dari BPS, terdapat sekitar 6,18 juta petani milenial di Indonesia, yang merupakan 21,93% dari total 28,19 juta petani. Jawa Timur memiliki jumlah petani milenial terbanyak, yaitu 971.102 orang, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 625.807 orang dan Jawa Barat dengan 543.044 orang.



Gambaran jumlah petani di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Jumlah petani di Indonesia berdasarkan umur versi BPS Tahun 2023

Kementerian Pertanian terus memfasilitasi generasi muda untuk terjun menjadi wirausaha pertanian, dengan menyediakan teknologi, alsintan, bibit gratis, serta pendampingan. Jika petani milenial bergerak bersama, produksi dapat meningkat, dan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) adalah perwakilan petani milenial yang adaptif terhadap teknologi dan peduli lingkungan. Pendataan petani milenial diperlukan untuk mempercepat diseminasi informasi dan teknologi serta pelaksanaan program utama Kementerian Pertanian.

Penumbuhan dan pemberdayaan petani melibatkan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga pertanian, bertujuan menekan kemiskinan dan urbanisasi dengan mengelola usaha pertanian secara berkelompok. Kementerian Pertanian juga mendorong pendidikan vokasi, dengan transformasi Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) bertaraf internasional, agar petani milenial bisa bersaing di dunia usaha dan industri pertanian global.

Pemerintah juga memfasilitasi petani milenial dengan Permentan No. 07/Permentan/OT.140/1/2013, yang mengatur pengembangan generasi muda pertanian, melalui berbagai program seperti Diklat Pertanian (*Agricultural Training Camp*), pemagangan di lahan pertanian, dan studi banding untuk mengamati langsung objek usaha tani. Untuk mendukung pembangunan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Kementerian Pertanian membentuk DPM dan DPA guna meningkatkan peran generasi muda dalam sektor pertanian.





Rekapitulasi DPM/DPA dan Jaringan Petani Nasional (JPN) Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi DPM/DPA dan Jaringan Petani Nasional (JPN) Tahun 2024

DPM/DPA	JPN BPPSDMP	JPN Keseluruhan	PM Lain
3.021	30.496	116.235	6.025

Sumber Data. Pusdiktan 2024

Salah satu kegiatan Mentan dengan petani milenial dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 25. Kegiatan Mentan bersama petani milenial di Dadahup - Kalteng, 27 September 2024.



INDRA BACHTIAR



Indra Bachtiar,
Horticulture Entrepreneur
Lembang, Jawa Barat



KADEK SURYA:
Empower 1,000 farmers, turnover of 4 billion, national and international partnerships (Albatel UAE, Superlative Singapore, Zeest LLC USA, Malaysia)



SLAMET WURYADI

Owns 3.5 hectares of private land, guides 446 breeders, turnover of more than 1 billion, collaborates with the Ministry of Agriculture, Ministry of Cooperatives and MSMEs, Ministry of Manpower, PT Comfeed, Charoen Phokphan, PT Medion, HOREKA, etc.



NURUL IMSANI
Innovate within the agriculture sector by producing banana chips

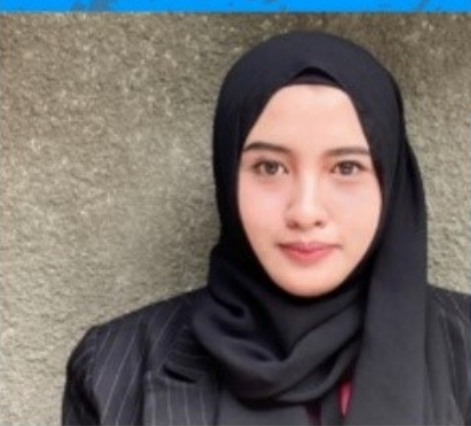
- President director of Sanirasa Group.
- Young Ambassador of YESS Programme of Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia 2022.
- Empowering banana farmers.
- Empowering local women through job creation, aligning with the GESI program.
- Cooperation with modern retailers such as Alfamart and others.
- Establishing 200 sales partnerships throughout Indonesia.
- Garnering thousands of social media followers with good branding.



MODEL OF YOUTH
AGROENTREPRENEURSHIP TO
ENCOURAGE FARMER REGENERATION
AND RURAL DEVELOPMENT IN
INDONESIA



Tinggalkan Status Pegawai, Nicki Bangun Mitra Pemuda Usaha Cabai



Nicki sejak awal memiliki minat yang besar di dunia usaha, alih-alih menjadi pegawai kantor, Nicki memilih untuk berwirausaha di bidang pertanian karena banyak sekali anak muda yang belum berminat menjadi petani. Nicki mengembangkan usaha di bidang pertanian, khususnya produksi cabai. Nicki juga mendampingi petani-petani lain untuk menjadi inti plasma.

Nicki Junianti, perempuan asal Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang juga jebolan Sekolah Vokasi IPB University, menjadi sosok inspirasi bagi para petani muda. Dirinya tidak peduli karena mendapat cemoohan ketika meninggalkan status karyawan swasta dan melepas pekerjaan di sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta.

Usaha budidaya cabai yang dirintisnya terus berkembang dan semakin mantap ketika mulai bersinggungan dengan Program Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS).

"Tantangan sih ada dari keluarga dan beberapa kawan, ketika meninggalkan pekerjaan yang sudah dijalani sekitar 3 tahun lebih. Saya terinspirasi dengan pimpinan kantor saya yang tidak berpendidikan tinggi tapi bisa punya usaha yang besar," ujar Nicki, peraih penghargaan Petani Milenial/Andalan Berprestasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, pada akhir Desember 2023 lalu.

Tekad membangun usaha sebenarnya sudah tertanam sejak lama. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas menjadi faktor utama mendorongnya untuk berbisnis. "Saya dari keluarga tidak mampu sehingga usaha yang rintih untuk membantu perekonomian kami. Ini mendorong saya untuk membuat usaha," jelasnya. Jauh sebelumnya, Nicki pernah menjalani bisnis properti dan penjualan online. Namun, pilihannya jatuh pada usaha cabai karena lebih menjanjikan prospeknya.

Dimulai dengan luasan hanya 1.000 m2 dan dibantu satu tenaga kerja perempuan, Nicki kini sudah mempunyai 10 karyawan tetap dan 25 tenaga harian lepas sesuai kebutuhan. Lahan yang digarapnya pun sudah berkembang, ada 1 hektare (ha) merupakan usaha sendiri dan 1 ha lainnya dikembangkan bersama investor.

Tidak ingin menikmati hasil sendiri, Nicki pun mengembangkan pola kemitraan dengan lima orang muda lainnya di sekitar Jasinga dan mulai berkembang hingga ke Lebak (Banten).

Perkenalannya dengan Program YESS sejak Agustus 2023 melalui fasilitator pemuda merupakan momentum yang tepat bagi Nicki. Dana hibah kompetitif yang diterimanya menjadi modal untuk mengembangkan para mitra yang juga sesama generasi muda di wilayah Jasinga. Berbagai strategi dan motivasinya mengembangkan mitra, seperti pola inti-plasma, justru semakin terdorong ketika bergabung dalam Program YESS.

Sangat berkesan dengan Program YESS, banyak ilmu yang didapat dan saya mendapat pencerahan untuk membuka plasma. Juga informasi mengembangkan pasar," ujar peraih penghargaan Petani Milenial/Andalan Berprestasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, pada akhir Desember 2023 lalu. Dirinya kini menjadi sosok yang menginspirasi rekan-rekannya di perbatasan Bogor (Jawa Barat), DKI Jakarta, dan Banten, di tengah ketidakberdayaan pada modal dan akses pasar. Demikian juga ketidakpahaman soal potensi pertanian dan motivasi yang minim. Selain membantu kawan-kawannya, Nicki pun harus meyakinkan generasi muda yang masih terlena di zona nyaman.

Dirinya kini menjadi sosok yang menginspirasi rekan-rekannya di perbatasan Bogor (Jawa Barat), DKI Jakarta, dan Banten, di tengah ketidakberdayaan pada modal dan akses pasar. Demikian juga ketidakpahaman soal potensi pertanian dan motivasi yang minim. Selain membantu kawan-kawannya, Nicki pun harus meyakinkan generasi muda yang masih terlena di zona nyaman.

"Padahal potensi pertanian masih sangat besar. Daripada jadi karyawan menunggu gaji bulanan, mending jalani usaha pertanian yang bisa gaji tiap empat hari sekali," tegas CEO REN Agro ini.

Namanya bisnis, apalagi usaha pertanian, tidak selamanya menjanjikan keberhasilan. Di tengah prospek yang besar, tentu ada kendala-kendala dan risiko usaha. Apalagi, budidaya cabai yang hasil panennya tidak bertahan lama serta rentan pada fluktuasi harga.

"Pernah, tiga kali merugi sampai dengan 150 juta-an. Cara mengatasinya yaitu tetap konsisten, replanting tanaman dan perlu backup usaha di bidang lain juga," jelasnya.

Untuk mengatasi risiko usaha, Nicki sudah mulai merencanakan pengolahan cabai menjadi sambal agar hasil panen yang berlimpah bisa tetap ditampung dan mempunyai nilai tambah.

Sosok Nicki, sebagaimana wanita gigih di wilayah lainnya dalam mengembangkan usaha pertanian patut menjadi contoh. Semoga usaha pertanian Nicki terus berkembang, semakin banyak anak muda dan masyarakat sejahtera bersama REN Agro. [KM]



Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung D Lantai 3
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Email : yess.pertanian@gmail.com
@yessprogramme
@yessprogramme
@yessprogramme
@yessprogramme
@yessprogramme
www.yesskementan.org



Mannaf Company
"from farm to the table"

Established in 2014, we produce best quality lamb and deliver it to our restaurant and aqeeqah catering services.

Powered by young human resources, leading the regional market and connected through national market

SUSENO BAYU WIBOWO SPT, MSI
Founder Director

We adapted internet of thing for data recording on farm

Up-stream

- Producing high quality lamb
- Supply regional and national market
- Clear standard operational procedure
- Full intensive farming, zero waste system
- Farming cooperation

Down-stream

- Restaurant and Aqeeqah food services
- Indonesian Signature Dish
- Premium taste & modern concept
- Halal licence for slaughtering house & butcher
- Fully spreaded in many regions of Central Java Indonesia
- We provide foreign aqeeqah services

We appreciated for further cooperation!

Pemalang, Central Java Indonesia

Contact us :
Phone/WhatsApp : +6285213643859 (Mr. ADI)
mannafperkasa@gmail.com

Rendang Ciheras and Lentera Farm

• Located in Ciheras village, Ciputajah sub-district of Tasikmalaya

• Operating since 2020, and specializing in producing the signature Rendang using beef and sheep sourced from Lentera Farm (2015)

• The production process revolves around local commodities and features integrated livestock farming, agriculture, and women's empowerment in the Ciheras village.

• We source our high-quality beef and sheep's meat from local farms that we manage and collaborate with.

• The secret to our mouthwatering flavors lies in the use of premium-quality spices and herbs sourced from local agriculture.

• Through effective utilization of local resources, we are positively impacting the socio-economic of Ciheras village community.

LET'S COLLABORATING
rendangciheras@gmail.com
@rendangciheras
+62 85156350740

The Farm

- 26 sheep farmers and 210 sheep
- 10 cattle farmers and 50 beef cattle
- Spices, Chili, and Coconut Farmer
- 15 Grass farmers

Food Production

- Producing Rendang by empowering women

Products

- Beef Rendang
- Sheep Rendang
- Beef Dendeng

Customers

- Domestic and overseas

EL Molla Jantan M.
CEO Rendang Ciheras dan Lentera Farm

NURUL IHSANI
Innovate within the agriculture sector by producing banana chips

BUYNAMA chips

- President director of Sanirasa Group.
- Young Ambassador of YESS Programme of Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia 2022.
- Empowering banana farmers.
- Empowering local women through job creation, aligning with the GESI program.
- Cooperation with modern retailers such as Alfamart and others.
- Establishing 200 sales partnerships throughout Indonesia.
- Garnering thousands of social media followers with good branding.

Produksi Pertanian dan Produk olahan dari koperasi Eptilu

Produk Hortikultura Utama Eptilu

Produk Olahan Utama Eptilu

Factory Plan EPTILU

MODEL OF YOUTH AGROENTREPRENEURSHIP TO ENCOURAGE FARMER REGENERATION AND RURAL DEVELOPMENT IN INDONESIA

EPTILU

RIZAL FAHREZA
RESEKSI KAWAN AGROENTREPRENEURSHIP
AJARAN YOUTH SOCIAL ENTREPRENEUR
FOUNDER EPTILU ARIELUS TOURISM

EPSPDMP

SIMON TABUNI

Empowering approximately 2.500 youth and women's groups to develop in the agricultural sector. Developing sago-based ecological tourism in Kais, South Sorong, West Papua

ANGKAT MAMA PAPUA

Anggimart

TAUFIK MAWADDANI

Entrepreneur in sheep farming with a production capacity of 1,500 heads, breeding sheep, dairy goats, feedmil

Educating livestock practitioners, and students through internship activities at the P4S Merapi Farm Training Center

ATILLA

Educating youth in South Solok to carry out coffee cultivation (upstream-downstream)

PAKET
ARABICA SPECIALTY & FINE ROBUSTA

Robusta Klasik

Arabica Honey

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Professional Daya Solok Wirausaha
http://dayasolok.wirausaha.go.id

YESS

Kopi adalah komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sudah saatnya optimisme petani kopi Indonesia ditebar. Menanamlah maka engkau akan menyelamatkan kehidupan.

ATILLA MAJIDI DATUK SIBUNGSU
Duta Petani Andalus Sumatera Barat
Owner Teras Kopi Pak Datuk

YESS Programme

3.4.2. Standardisasi Instrumen Pertanian

Sektor pertanian memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional, meskipun dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seperti degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, dan perubahan iklim. Produksi pertanian Indonesia dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, mayoritas adalah petani kecil dengan luas lahan rata-rata kurang dari 0,5 ha untuk memenuhi kebutuhan pangan 273 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kecukupan pangan dan kesejahteraan petani.

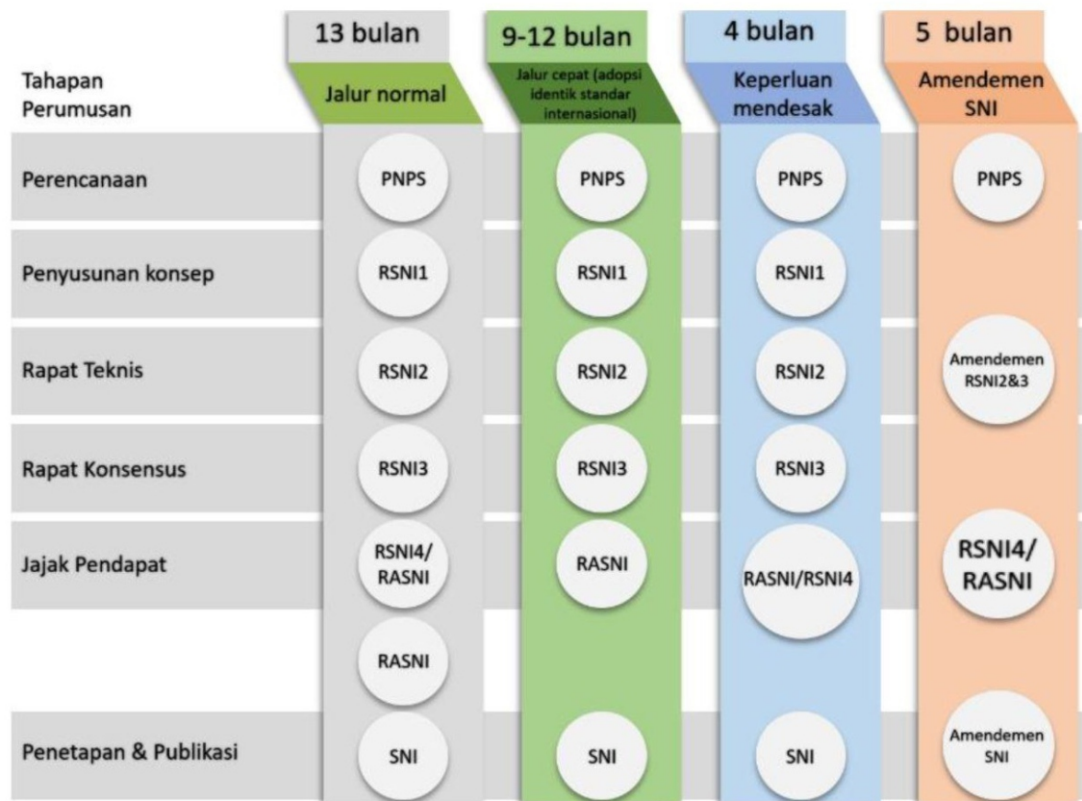
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan mengamanatkan bahwa sarana dan prasarana pertanian, seperti benih, bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian, harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Namun, menurut Survei Pertanian Terintegrasi BPS 2020, 89,72% lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur tidak memenuhi standar, sementara hanya 10,28% yang sudah memenuhi. Standardisasi dalam pertanian bertujuan untuk mengukur mutu produk dan jasa, memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, serta lingkungan, dan meningkatkan daya saing serta kelancaran perdagangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, proses standardisasi mencakup perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan pengawasan standar secara tertib dan bersama pemangku kepentingan. Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan hasil akumulasi pengetahuan, teknologi, dan pengalaman yang didapat dari konsensus antara semua pihak terkait.

Perumusan standar didasarkan pada Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sehingga Perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien. Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) pada t-1. Program Nasional Perumusan Standar adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Setelah PNPS yang diusulkan disetujui, maka disusun Rancangan SNI sebagaimana dalam Gambar 23. Adapun yang masuk dalam standar instrumen pertanian yaitu:

- Alat dan mesin pertanian yang dipakai *on farm* dan *off farm* untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin pengolahan lahan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian, termasuk alsin yang berbasis *AI*, *IoT* dan *Cyber Physical System*);
- Sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk dan pestisida);
- Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS;
- Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan





Gambar 26. Tahapan Penyusunan Rancangan RSNI

Untuk mendukung perumusan SNI, maka dibentuk Komisi Teknis (Komtek) sesuai dengan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia. BSIP mengelola 12 Komtek yaitu:

- Sarana dan Prasarana Pertanian (65-04)
- Tanaman Pangan (65-11)
- Hortikultura (65-15)
- Bibit dan Produksi Ternak (65-16)
- Pakan Ternak (65-17)
- Perkebunan (65-18)
- Kesehatan Masyarakat Veteriner (65-20)
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian (65-21)
- Pascapanen Pertanian (65-22)
- Sumber Daya Lahan Pertanian (65-23)
- Pertanian Berkelanjutan (65-24)
- Kesehatan Hewan (11-16)

Adapun jumlah RSNI3 yang dihasilkan pada tahun 2024 sebanyak 54 SNI

Selain penyusunan standar, dilakukan pendampingan lembaga penerap standar. Pendampingan dilakukan pada 76 lembaga penerap standar meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, Industri Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Wanita Tani, Penangkar Benih, Perseroan Terbatas, CV, asosiasi pelaku usaha serta Badan Usaha Milik Desa. SNI yang diterapkan ada 22 SNI yang telah ditetapkan sebelum tahun 2024 yaitu 18 SNI Produk, 3 SNI sistem, dan 1 SNI Proses. Sebaran pendampingan Lembaga Penerap Standar yang dilaksanakan di lingkup BBPSIP TA2024 disajikan pada Gambar 27 di bawah ini.



Gambar 27. Sebaran Pendampingan Lembaga Penerap Standar Tahun 2024

Pendampingan Lembaga penerap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen pertanian yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan pengolahan komoditas pertanian. Dengan adanya penerapan standar yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pendampingan penerapan standar yang dilakukan oleh BPSIP selama tahun 2024 telah memperoleh hasil diantaranya: telah diperolehnya sertifikat SNI pada Lembaga yang didampingi oleh 23 satker (BBPSIP dan 22 BPSIP), yaitu: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, MKalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat dan Kepulauan Riau.

Untuk mendukung penerapan standar yang semakin meluas, maka BSIP melakukan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dalam rangka memberi informasi, pengetahuan dan keterampilan para penerap standar, sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan standar pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi dan jagung. Kegiatan dilaksanakan di 24 provinsi lokasi pengembangan komoditas padi dan jagung nasional. Adapun Sebaran Kegiatan Penerap Standar Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 25.



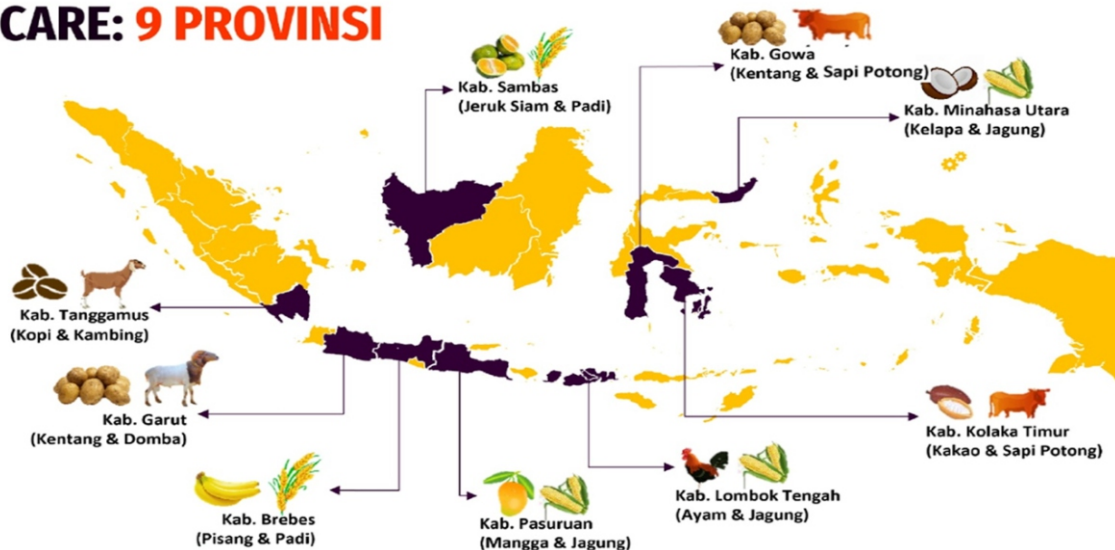
Gambar 28. Sebaran Kegiatan Penerap Standar Tahun 2024.

Penerapan standar juga didukung melalui anggaran pinjaman luar negeri. Kementerian Pertanian melalui BSIP bersama dengan *World Bank* pada tahun 2022 telah menyusun Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* yang difokuskan pada komoditas-komoditas bernilai ekonomis tinggi, untuk mitigasi adanya risiko impor komoditas strategis yang cenderung terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah (*value-added*) sektor pertanian dan tentunya untuk mendorong ekspor. Melalui program *ICARE* yang didukung oleh Bank Dunia dan Bappenas, BSIP telah merancang pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan standar instrumen pertanian di Indonesia.

Program *ICARE* BSIP difokuskan pada pembangunan kawasan penerapan standar instrumen pertanian dengan dukungan dari korporasi petani. Program ini dijalankan selama 5 tahun, dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2027, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BSIP, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, off taker, serta *stakeholder* lainnya. Lokasi dan komoditas *ICARE* di 9 Provinsi dapat dilihat pada Gambar 29 di bawah ini.



ICARE: 9 PROVINSI



Gambar 29. Lokasi dan komoditas ICARE di 9 Provinsi

3.4.3. Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian

Reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak akhir 1990-an untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan strategis seperti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map RB 2020-2024 terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Reformasi ini mencakup delapan area perubahan, antara lain tata kelola organisasi, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta transformasi budaya kerja. Berbagai regulasi terbaru, seperti PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 dan KepmenPAN-RB Nomor 182 Tahun 2024, memperkuat pentingnya evaluasi reformasi birokrasi untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Di tingkat Kementerian/Lembaga, implementasi reformasi dilakukan melalui langkah-langkah seperti penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi. Berbagai inovasi juga terus dikembangkan guna mempercepat pelayanan publik, memperbaiki sistem kerja, serta meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 2023-2024, dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

1. Dimensi RB General – Menilai reformasi birokrasi secara menyeluruh dalam aspek kebijakan, kelembagaan, tata laksana, SDM, pengawasan, dan pelayanan publik.
2. Dimensi RB Tematik – Berfokus pada isu strategis tertentu, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, efisien, responsif terhadap perubahan, serta berorientasi pada hasil demi pelayanan publik yang lebih baik.

Pada tahun 2024, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 28 kegiatan utama, yaitu:





- 1). Rencana Aksi Pembangunan RB General
- 2). Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General
- 3). Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
- 4). Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
- 5). Tingkat Manuritas SPIP
- 6). Tingkat Keberhasilan Pembangunan Z
- 7). Nilai SAKIP
- 8). Indeks Perencanaan Pembangunan
- 9). Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
- 10). Tingkat Digitalisasi Arsip
- 11). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- 12). Indeks Pengelolaan Aset
- 13). Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
- 14). Indeks Kualitas Kebijakan
- 15). Indeks Reformasi Hukum
- 16). Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 17). Indeks Tata Kelola Pengadaan
- 18). Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN
- 19). Indeks Pelayanan Publik
- 20). Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
- 21). Indeks SPBE
- 22). Capaian Prioritas Nasional
- 23). Capaian IKU
- 24). Opini BPK
- 25). Tindak Lanjut Rekomendasi
- 26). Indeks BerAkhlak
- 27). Survei Penilaian Integritas
- 28). Survei Kepuasan Masyarakat

Selain itu, dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 menetapkan 4 (empat) tema dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Realisasi investasi;
3. Digitalisasi pemerintahan; dan
4. Prioritas aktual Presiden.

Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal mencakup peninjauan *road map* dan Rencana Aksi RB untuk memastikan kualitas perencanaan serta efektivitas pelaksanaannya. Evaluasi ini juga bertujuan memberikan rekomendasi dalam mengatasi kendala yang muncul. Di Kementerian Pertanian, evaluasi internal ini dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal, yang juga bertanggung jawab dalam menilai pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik agar sejalan dengan kebijakan reformasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 84,8 mengalami kenaikan sebesar 6,48% dari capaian tahun 2023 sebesar 79,64. Nilai RB tersebut disampaikan oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 27 Februari 2025 melalui portal Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 9 dibawah.

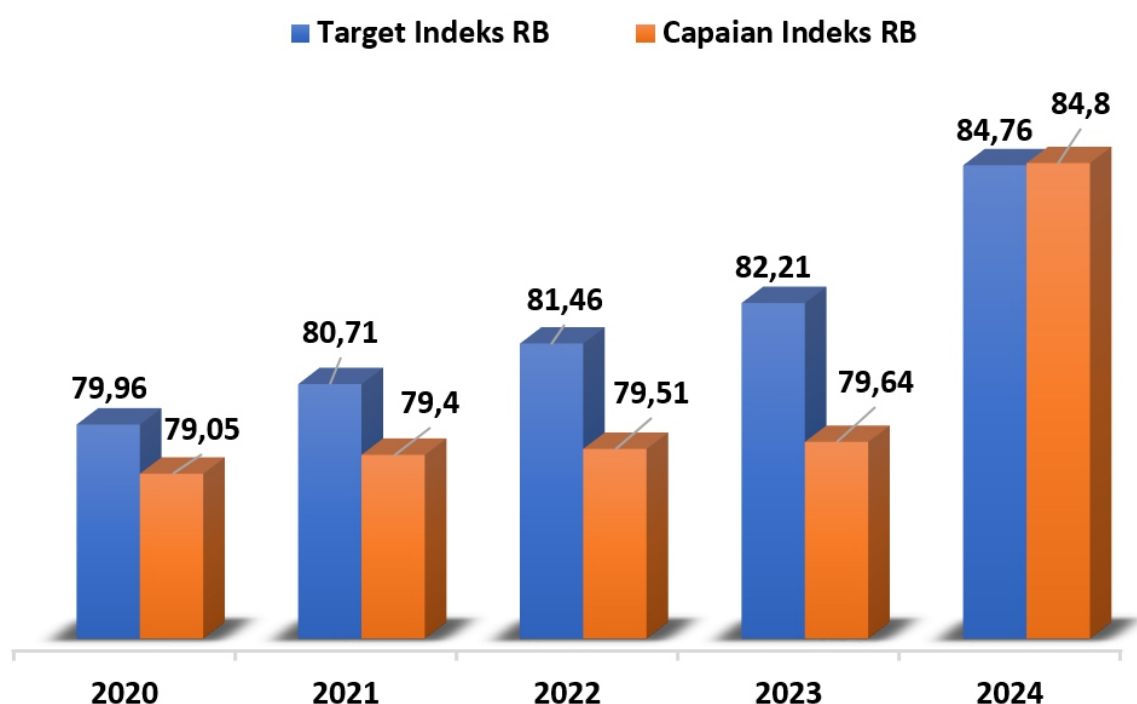


Tabel 9. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2024

No.	Dimensi	Nilai
1.	RB General (skala 1-100)	78,16
2.	RB Tematik (sakal 1-10)	6,64

Sumber: KemenPAN-RB, 2025

Kementerian Pertanian terus berkomitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi secara progresif. Nilai RB dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif strategis. Gambar 30 berikut menyajikan perkembangan target dan realisasi indikator nilai RB dari tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 30. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa nilai-nilai dasar BerAKHLAK akan menjadi acuan sebagai dasar penerapan budaya kerja di Kementerian Pertanian untuk mewujudkan birokrasi organisasi yang sehat, transparan serta akuntabel.



Tren peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dalam lima tahun terakhir mencerminkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Berbagai indikator utama menunjukkan perkembangan positif, termasuk indeks penyederhanaan birokrasi, indeks perencanaan pembangunan, tingkat implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks reformasi hukum, serta hasil survei penilaian integritas. Peningkatan ini didukung oleh berbagai inisiatif strategis, seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi, efisiensi layanan publik, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. Sinergi antara berbagai unit kerja dalam menerapkan kebijakan reformasi birokrasi semakin diperkuat, menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adaptif terhadap perubahan. Tren positif ini menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusinya terhadap pembangunan sektor pertanian nasional.

3.4.4. Perjanjian dan Kesepakatan Strategis di Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan. Apresiasi yang diberikan oleh pihak eksternal merupakan bukti keberhasilan kinerja Kementerian Pertanian dimata publik dalam memberikan pelayanan publik, inovasi pelayanan, kepatuhan terhadap peraturan dan upaya lainnya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Penghargaan ini tidak hanya semata sebagai pembuktian upaya nyata Kementerian Pertanian, namun juga menjadi pemicu semangat untuk semakin meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Apresiasi tersebut antara lain:

1. Penghargaan Sangat Baik Untuk Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Kementerian Pertanian meraih penghargaan 'Sangat Baik' dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), sesuai Perpres 42/2020. Penilaian ini bertujuan mengevaluasi percepatan berusaha serta memberikan insentif atau koreksi bagi K/L. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan swasembada, sesuai arahan Presiden Prabowo, didukung oleh perbaikan layanan publik.



Gambar 31. Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha



2. Anugerah *Top Digital Awards* 2024

Kementerian Pertanian pada tahun 2024 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang *Top Digital Awards* 2024. Adapun penghargaan yang diterima yaitu '*Top Digital Implementation* 2024 #Level Stars 5' untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan '*Top Leader on Digital Implementation* 2024' untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.



Gambar 32. Penghargaan *Top Digital Awards* Tahun 2024

3. *Bhumandala Awards*

Kementan memperoleh penghargaan *Bhumandala Ariti* atas kontribusinya dalam penyusunan peta lahan peternakan skala 1:50.000. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementan dalam pemetaan sumber daya alam yang dapat menunjang pengelolaan peternakan di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 33. Kementerian Pertanian Raih *Bhumandala Awards* Tahun 2024



4. *Anindhita Wistara Data* dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor tahun 2024 disampaikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Pertanian adalah 3,67 dengan predikat sangat baik. Pada kesempatan ini, Kementerian Pertanian mendapatkan penganugerahan *Anindhita Wistara Data* sebagai Kementerian terbaik pertama tingkat nasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral.



Gambar 34. Penyerahan Penghargaan *Anindhita Wistara Data*

5. Anugerah Media Humas

Kementerian Pertanian kembali meraih penghargaan Komunikasi Publik untuk keempat kalinya dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo. Melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementan meraih Terbaik 1 dalam kategori Kampanye Komunikasi Publik Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD dengan tema Gerak Cepat Atasi Kekeringan. Penghargaan ini diberikan atas kecepatan dan ketepatan Kementan dalam menyampaikan informasi serta menjalankan langkah konkret menghadapi kekeringan, termasuk program pompanisasi yang terbukti membantu petani menjaga produktivitas lahan di tengah ancaman iklim ekstrem.



Gambar 35. Sertifikat dan Piagam Terbaik I Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024

3.5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Untuk melaksanakan 4 program kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024, Kementerian Pertanian memperoleh dukungan anggaran APBN sebesar Rp15.585.644.566.000,- dengan realisasi sebesar Rp14.272.137.630.919,- atau mencapai 91,57%. Pada tahun 2024, terdapat pagu blokir *automatic adjustment* pada anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp421.829.409.000,-, dan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp52.915.964.000,-, maka pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp15.110.899.193.000,- sehingga realisasi Kementerian Pertanian tahun 2024 berdasarkan pagu efektif sebesar 94,45%.

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan *automatic adjustment* yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA. 2024 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampu 4 (empat) program Kementerian Pertanian.





#kegiatanmentan



ODIESEL B-50
MANDIRI ENERGI



#kegiatanmentan





BAB IV

KEBIJAKAN AKSELERATIF

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, kompetisi penggunaan lahan dan air akan semakin tinggi. Kebijakan akselerasi peningkatan produksi pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun dan mencapai swasembada dan lumbung pangan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian perlu dilakukan secara simultan. Secara teknokratik, Kementerian Pertanian membuat terobosan baru dengan cara menarik penyuluh pertanian menjadi bagian dari pegawai pusat yang ditempatkan di daerah melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

4.1. Sentralisasi Penyuluh Pertanian

Visi Presiden Prabowo Subianto, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", mencerminkan komitmennya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, dan sejahtera pada tahun 2045. Dalam kerangka visi tersebut, salah satu aspek penting yang ditekankan adalah penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Asta Cita yang terkait dengan pertanian, seperti mendorong swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi, menjadi landasan dalam upaya untuk mencapai kedaulatan nasional.

Langkah strategis yang diambil Kementerian Pertanian adalah melalui transformasi pertanian tradisional ke pertanian *modern* untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Melalui perpaduan antara penggunaan sumberdaya pertanian (penyuluh, kelompok tani dan petani) dan penerapan teknologi pertanian *modern*, seperti penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), sistem irigasi cerdas, serta pemanfaatan data dan analitik untuk pengelolaan lahan, biaya produksi dapat ditekan hingga 50%. Namun demikian perpaduan antar sumberdaya dan *tools* (teknologi dan modernisasi) tidak serta merta menjadikan praktik pertanian berjalan secara *smooth* (lancar/beriringan) antara kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan ketenagaan penyuluh pertanian di Indonesia sehingga masih membutuhkan perhatian. Dari 6.842 kecamatan yang ada di Indonesia, baru terdapat 5.829 BPP, dengan berbagai kondisi yang berbeda di setiap daerah. Sampai dengan akhir 2024, jumlah penyuluh pertanian di Indonesia mencapai 37.605 orang, yang terdiri dari 22.677 penyuluh PNS, 13.816 penyuluh PPPK, dan 1.112 tenaga harian lepas (THL-TB PP) yang didanai oleh APBN. Meskipun jumlah penyuluh cukup besar, distribusi yang tidak merata dan kualitas pelatihan yang beragam masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan efektivitas program penyuluhan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih untuk mendukung swasembada pangan dan kemandirian petani.



Mentan Amran sedang memberikan penjelasan ke masyarakat Papua terkait manfaat lahan Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan telah diterbitkan. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota dengan maksud penguatan koordinasi, dan agar proses pengalihan penyuluh pertanian ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Kementerian Pertanian berjalan dengan baik dan program swasembada pangan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

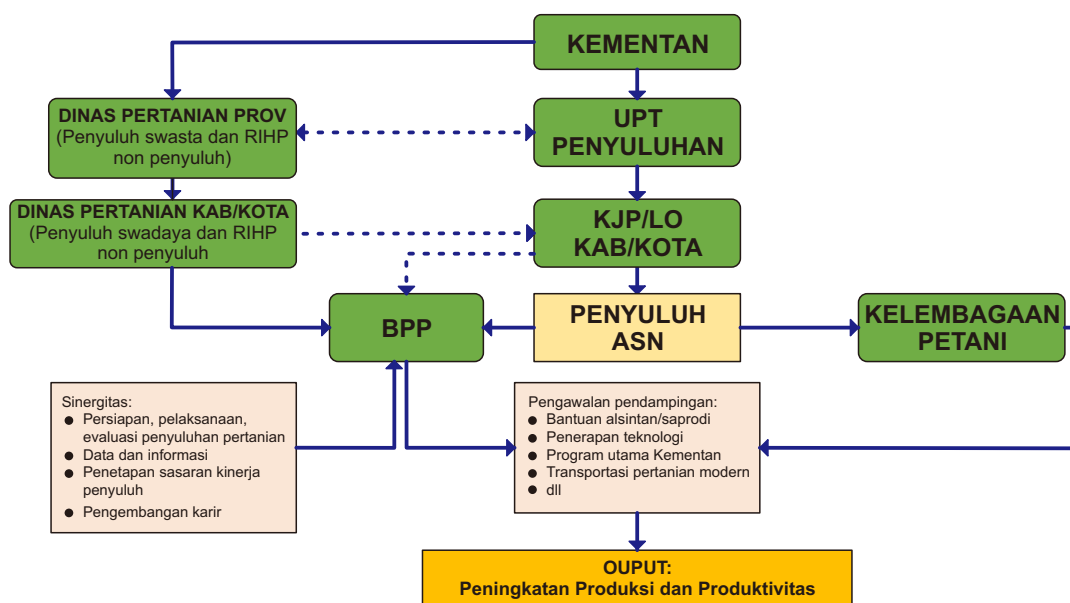
Khusus kepada Menteri Pertanian, presiden menginstruksikan agar menyediakan dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian ASN; menyusun dan/atau mengembangkan standardisasi kompetensi dan standar jabatan penyuluh pertanian; mengembangkan kelembagaan petani dan KEP; memberikan dukungan penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mendukung tugas penyuluh pertanian dalam rangka percepatan program swasembada pangan berkelanjutan; membangun dan mengembangkan pangkalan data dan jaringan informasi penyuluhan pertanian; memetakan dan mendistribusikan penyuluh pertanian ASN.



Gambar 36. Kegiatan sekolah lapang yang diinisiasi oleh penyuluh pertanian

Secara khusus Presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran untuk kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang. Sementara itu kepada Menteri PAN-RB Presiden menginstruksikan agar menetapkan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian termasuk kebutuhan jabatan fungsional penyuluh pertanian ASN Kementerian Pertanian yang berasal dari pengalihan penyuluh pertanian ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kepada Menteri Dalam Negeri Presiden menginstruksikan untuk menyosialisasikan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan berkelanjutan; memfasilitasi dan mengoordinasikan pemda provinsi dan kab/kota dalam kegiatan pendayagunaan penyuluh pertanian ASN oleh Kementerian Pertanian. Kemudian secara khusus Presiden menginstruksikan kepada Kepala BKN untuk melaksanakan pengalihan Penyuluh Pertanian ASN dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Kementerian Pertanian.

Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta suber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan tata hubungan kerja pendayagunaan penyuluhan pertanian dapat dilihat pada Gambar 37 berikut:



Gambar 37. Rancangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan tata hubungan kerja pendayagunaan penyuluh pertanian

Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden tersebut telah dilakukan Langkah-langkah dengan menyusun naskah akademik pembentukan UPT Penyuluhan Pertanian; menyusun *database* penyuluh pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh; menyusun pedoman indikator kinerja penyuluh pertanian, pedoman pengelolaan BPP, pedoman mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluh pertanian, pedoman penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan KEP yang berorientasi bisnis; menyusun pedoman umum formasi penyuluh pertanian ASN, penyusunan buku saku penyuluhan pertanian; melakukan sosialisasi Inpres Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian; dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Tatakelola Pupuk Bersubsidi, sosialisasi Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 tahun 2025, serta mendorong penyuluh untuk melakukan pendampingan Gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi.



4.2. Koordinasi Lintas Sektor

Lingkungan strategis saat ini berubah sangat cepat dan dinamis, sehingga pendekatan pembangunan pertanian harus diarahkan kepada sistem dan usaha pertanian hulu-hilir, pengelolaan manajemen yang utuh dan percepatan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor. Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai menjadi ruh/spirit dalam kolaborasi antar Lembaga dan instansi yang terlibat antar sektor.

4.2.1. Koordinasi Bersama TNI-POLRI

Beberapa peranan yang dilakukan dari instansi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi (Diktum 10). Panglima Tentara Nasional Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi (Diktum 11).

Beberapa kesepakatan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah ditindaklanjuti secara teknis oleh Eselon I terkait, diantaranya adalah:

- *MoU/PKS* Direktur Jenderal Tanaman Pangan bersama Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Nomor B-665/HK.220/C/02/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Tanaman Pangan tanggal 29 Februari 2024.
- *MoU/PKS* Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bersama Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Nomor 01/PKS/B/02/2024 tentang Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tanggal 29 Februari 2024.

Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman
bersama Panglima TNI
Jenderal TNI Agus Subiyanto
menunjukkan dokumen
kerja sama dukungan
pembangunan pertanian



- *MoU/PKS* Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Nomor 29092/HK.230/F/02/2024 tentang Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 29 Februari 2024.
- *MoU/PKS* Menteri Pertanian bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Ka Polri) Nomor 04/MoU/HK.220/M/04/2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pembangunan Pertanian pada tanggal 25 April 2024.
- *MoU/PKS* Direktur Jenderal Tanaman Pangan bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam Polri) Nomor B-4317/HK.200/C/12/2024 tentang Bantuan Pengamanan dan Pendampingan pada Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan pada tanggal 18 Desember 2024.
- *MoU/PKS* Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam Polri) Nomor 03/PKS/B/12/2024 tentang Bantuan Pengamanan Peredaran Pupuk dan Pestisida pada tanggal 18 Desember 2024.

4.2.2. Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga

Saat ini struktur kelembagaan Kementan telah mengalami perubahan seiring dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Karantina Indonesia (Barantin). Badan Ketahanan Pangan telah berubah menjadi Bapanas; sementara Badan Litbang Pertanian telah berganti nama menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan Badan Karantina Pertanian telah berubah menjadi Barantin. Perubahan struktur organisasi tersebut, menjadikan tugas dan fungsi Kementan saat ini secara implisit lebih difokuskan pada peningkatan produksi komoditas pertanian.

Beberapa kesepakatan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah ditindaklanjuti secara teknis oleh Eselon I terkait, diantaranya adalah:

Kementerian Pertanian bersama Kementerian Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) program “Cetak Sawah Rakyat” untuk mewujudkan swasembada pangan.



- *MoU/PKS* Menteri Pertanian dan Dalam Negeri Nomor 05/MOU/HK.020/M/06/2024 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian tanggal 07 Juni 2024.
- *MoU/PKS* Menteri Pertanian dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/MOU/HK.220/M/11/2024 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Pertanian tanggal 06 November 2024.
- *MoU/PKS* Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/MOU/HK.220/M/11/2024 tentang Sinergi Dukungan Infrastruktur dalam Mewujudkan Swasembada Pangan tanggal 08 November 2024.

Sejumlah kesepakatan/*MoU* yang telah ditandatangani secara garis besar memberikan dukungan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang bersumber dari alokasi sumberdaya yang dimiliki dan dukungan infrastruktur dasar pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, tata kelola dan tata laksana sinergitas program ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Pertanian.





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

APA ITU COMBINE HARVESTER?

Alat pemanen padi dan jagung yang mampu menggabungkan alat pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi dan pengantongan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol

MANFAAT COMBINE HARVESTER

- Efisiensi Waktu – Percepat proses panen
- Hemat Tenaga Kerja
- Kualitas Hasil Panen Lebih Baik – Meminimalisir kerusakan dan menjaga kualitas hasil panen
- Pengurangan Risiko Kerugian – Meminimalisir risiko kehilangan hasil panen akibat cuaca buruk ataupun keterlambatan panen
- Modernisasi Pertanian – Mendukung transformasi pertanian tradisional menjadi modern.

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id

BAB-V

PENUTUP

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2024 menyajikan keberhasilan capaian kinerja sektor pertanian tahun 2024. Selain itu laporan ini juga menyajikan keberhasilan capaian kinerja Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian yang dirancang pada Tahun 2024 pada Sub Sistem Hulu, Sub Sistem On Farm, Sub Sistem Hilir, hingga Sub Sistem Pendukung. Secara umum, pencapaian keberhasilan kinerja Kementerian Pertanian pada tahun 2024 dapat dilihat dari indikasi beberapa keberhasilan capaian pada tahun 2024, sebagaimana yang akan diuraikan berikut.

1. Stok Beras Mencapai Prestasi Tertinggi Selama 7 Tahun Terakhir

Selama periode tujuh tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam sektor pertanian khususnya dalam produksi beras. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Puncaknya terjadi pada periode Januari hingga April 2025, di mana produksi beras mencapai titik tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pencapaian ini menjadi tonggak penting yang mencerminkan hasil nyata dari peningkatan produktivitas pertanian, adopsi teknologi modern, perluasan lahan tanam, serta efektivitas distribusi pupuk dan irigasi.

Sejak tahun 2018 pemerintah dan petani telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga dinamika pasar global. Namun melalui kerja sama lintas sektor dan komitmen kuat dari berbagai pihak, produksi beras Indonesia berhasil terus meningkat. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian nasional semakin tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Prestasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor beras.

**Tabel 10. Produksi Beras Januari-Desember 2018-2024 dan Januari-Maret 2025
KSA BPS (Ton)**

No.	Bulan	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*)
1	Januari	1.597.159	1.168.198	934.331	1.200.266	1.416.643	1.340.906	874.266	1.243.332
2	Februari	3.292.203	2.083.208	1.327.945	2.336.620	2.350.250	2.849.262	1.387.718	2.250.903
3	Maret	5.552.374	5.254.902	3.632.380	5.570.088	5.492.153	5.134.806	3.431.331	5.484.809
4	April	4.361.930	5.120.941	5.625.822	4.475.680	4.454.911	3.659.442	5.377.774	
5	Mei	2.811.800	2.504.865	3.585.590	2.277.013	2.383.003	2.860.580	3.711.306	
6	Juni	2.576.164	2.474.516	2.059.035	2.326.004	2.510.392	2.786.597	2.096.451	
7	Juli	3.117.487	2.662.700	2.578.403	3.175.452	2.710.682	2.482.905	2.052.440	
8	Agustus	3.082.295	3.214.197	3.344.733	2.401.822	2.350.981	2.523.942	2.950.964	
9	September	2.974.089	2.429.648	3.160.887	2.464.450	2.500.041	2.516.529	3.162.083	
10	Oktober	1.907.535	1.899.125	2.454.950	2.302.018	2.383.083	2.194.502	2.627.790	
11	November	1.606.292	1.522.141	1.858.097	1.652.625	1.876.081	1.615.447	1.797.130	
12	Desember	1.084.019	978.592	934.575	1.173.979	1.112.300	1.136.369	1.151.996	
Produksi Jan-Apr		14.803.665	13.627.249	11.520.478	13.582.654	13.713.957	12.984.416	11.071.089	13.948.785
Produksi Jan-Des		33.963.346	31.313.034	31.496.747	31.356.017	31.540.522	31.101.285	30.621.249	13.948.785

Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik BPS (3 Maret 2025)

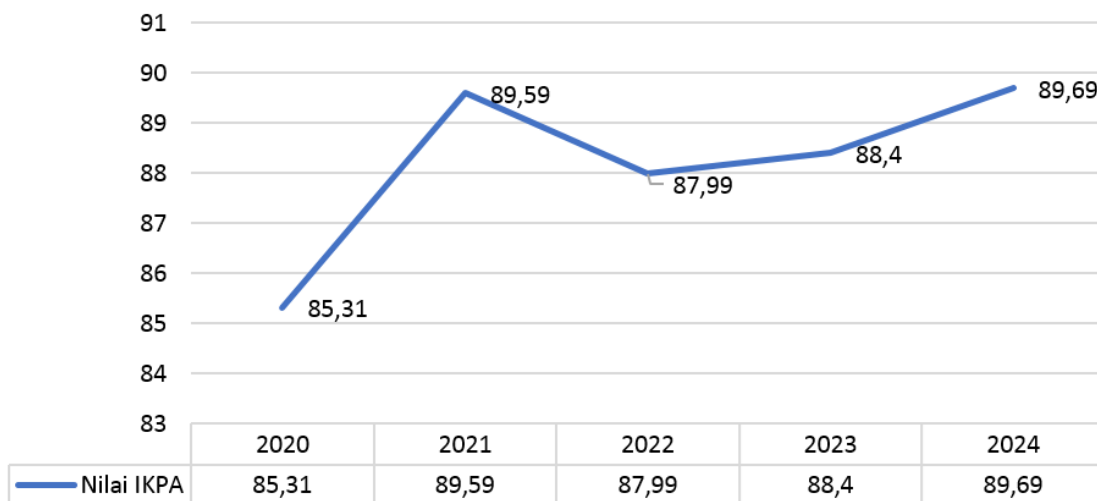
2. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2024 mendapatkan nilai 84,8. Nilai tersebut mengalami kenaikan 6,48% dari capaian tahun 2023 sebesar 79,64. Nilai RB tersebut disampaikan oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 27 Februari 2025 melalui portal Reformasi Birokrasi Nasional. Kementerian Pertanian terus berkomitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi secara progresif. Nilai RB dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif strategis Kementerian Pertanian, seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi, efisiensi layanan publik, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

Tren peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dalam lima tahun terakhir menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan positif indikator utama Kementerian Pertanian, termasuk indeks penyederhanaan birokrasi, indeks perencanaan pembangunan, tingkat implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks reformasi hukum, serta hasil survei penilaian integritas. Sinergi antara berbagai unit kerja dalam menerapkan kebijakan reformasi birokrasi semakin diperkuat dengan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adaptif terhadap perubahan. Tren positif ini menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusinya terhadap pembangunan sektor pertanian nasional.

3. Nilai IKPA Tahun 2024, Nilai Terbaik pada 5 Tahun Terakhir

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Pertanian pada Tahun 2024 berhasil menembus angka 89,69. Nilai ini merupakan nilai terbaik sepanjang 5 tahun terakhir



sumber: Omspan Kemenkeu 2025

Gambar 38. Nilai IKPA Kementan 2020-2024

4. Nilai NKA

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2024 meraih nilai 91,13. Walaupun nilai NKA Tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, namun predikat NKA Tahun 2024 masih termasuk dalam kategori dengan Predikat “Sangat Baik”.



5. Kenaikan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/638/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, disampaikan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian menunjukkan nilai sebesar 74,45 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

6. Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan suatu wilayah atau sektor. Indeks ini biasanya mencerminkan sejauh mana suatu perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan lokal. Berdasarkan Lembar Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Pertanian dengan Bappenas, Kementerian Pertanian mendapatkan total nilai 91,03 dengan predikat “Sangat Baik”.

7. Capaian Prioritas Nasional (PN)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional (EKPN) Tahun 2023 menilai kinerja Kementerian/Lembaga dalam mendukung pencapaian PN RKP 2023 berdasarkan dua aspek utama: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Capaian RO PN. Kementerian Pertanian mencapai kinerja IKSS sebesar 100% dan kinerja RO PN sebesar 97,25%, sehingga menghasilkan capaian PN sebesar 98,63. Selain itu, penyerapan anggaran PN Kementerian Pertanian mencapai 95,73%, yang menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan anggaran.

8. Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kementerian Pertanian dilakukan dua kali setahun, melibatkan berbagai unit penyelenggara pelayanan dengan total 120 UPP dan 474 produk layanan. Tujuan survei ini adalah mengukur kepuasan pengguna terhadap 9 unsur layanan publik, mengidentifikasi harapan pengguna, serta memperbaiki layanan yang kurang optimal. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 mencapai 3,62 dengan nilai konversi 90,5, masuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini melebihi target 90 dengan persentase realisasi 100,43%, menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.



9. Tingkat Maturitas SPIP

Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP dilakukan dengan mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil evaluasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,85 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2.

Keberhasilan dan capaian yang disampaikan pada laporan ini, tentu saja tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2024. Berikut ini disarikan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2024 yang dirangkum dari laporan Unit Kerja Eselon I.

PERMASALAHAN

Pertama, yaitu permasalahan yang terkait dengan tata kelola. Tata kelola dalam konteks ini dapat diartikan tata kelola secara luas, seperti tata kelola anggaran, sumber daya, waktu, ataupun tempat. Pada tata kelola anggaran misalnya, masih ditemukan pengalokasian anggaran yang baru diputuskan menjelang akhir tahun anggaran 2024 atau misalnya alokasi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentu saja berdampak pada terhambatnya proses pencairan anggaran dan juga risiko tidak terlaksananya kegiatan. Tata kelola SDM juga masih menjadi masalah yang muncul di tahun 2024. Hal ini bisa dilihat dari terbatasnya jumlah SDM yang mengolah lahan pertanian, segian besar lahan pertanian masih mengandalkan petani-petani “sepuh” dalam mengolah lahan atau dalam hal pengelola anggaran di satker daerah, masih banyak satker yang kekurangan SDM pengelola keuangan yang bisa mengelola anggaran. Tata kelola waktu juga masih menjadi masalah yang ditemukan di tahun 2024, misalnya masih ditemukan penyaluran bantuan benih di luar waktu yang seharusnya. Begitu juga dalam tata kelola tempat, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi isu yang harus dibenahi.

Kedua, yaitu permasalahan yang terkait dengan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Dua masalah yang kerap terjadi setiap tahun ini sangat rawan gagal panen. Upaya perbaikan yang dirancang setiap tahun, belum menemukan solusi optimal.

Ketiga, yaitu permasalahan terkait dengan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) juga menjadi masalah yang terjadi di tahun 2024 dengan berbagai macam modusnya seperti perubahan CPCL sebagai dampak verifikasi lapangan yang tidak memenuhi kriteria teknis. Pada tahun 2024, beberapa Dinas Kabupaten menyatakan tidak sanggup melaksanakan kegiatan dari Kementerian Pertanian karena alasan CPCL ini.





REKOMENDASI

Berdasarkan catatan capaian dan permasalahan di atas, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa selanjutnya:

Pertama, penguatan tata kelola anggaran dan sumber daya manusia secara sistemik dan berkelanjutan. Meskipun Kementerian Pertanian telah menunjukkan kinerja sangat baik dalam berbagai indikator seperti capaian produksi beras tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, nilai Reformasi Birokrasi yang meningkat signifikan, dan perolehan nilai IKPA serta NKA yang tergolong sangat baik, masih terdapat tantangan mendasar dalam hal penataan anggaran dan SDM. Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sejak awal tahun anggaran, serta peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM di daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan tenaga kerja di sektor on-farm.

Kedua, memperkuat sistem mitigasi risiko pertanian berbasis data dan teknologi guna menghadapi dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Capaian positif seperti swasembada beras, indeks perencanaan pembangunan yang sangat baik, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik menunjukkan fondasi yang kuat. Namun, risiko gagal panen akibat DPI dan OPT masih menjadi ancaman yang berulang. Untuk itu, perlu ditingkatkan kapasitas early warning system, optimalisasi teknologi prediksi cuaca dan pemetaan wilayah rawan DPI, serta kolaborasi dengan lembaga riset untuk pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap iklim ekstrem dan serangan hama.

Ketiga, penyempurnaan mekanisme penetapan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) melalui integrasi data spasial dan verifikasi berbasis sistem elektronik. Meskipun capaian prioritas nasional (PN) Kementerian Pertanian berada di angka sangat tinggi (98,63%) dan tingkat akuntabilitas kinerja telah memperoleh predikat “Sangat Baik”, kendala dalam hal perubahan CPCL dan ketidaksesuaian kriteria teknis masih menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu, sistem penetapan CPCL harus dikembangkan secara digital dan terintegrasi dengan data kependudukan, data spasial, serta basis data petani untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelaksanaan program bantuan maupun kegiatan strategis lainnya.



Lampiran 1. Tabel RSNI3 yang diusulkan oleh BSIP yang telah ditetapkan menjadi SNI oleh BSN pada tahun 2024.

No	NO SNI	JUDUL SNI
<i>Bidang Tanaman Pangan</i>		
1	SNI 11746:2020	Beras - Penentuan Karakteristik Biometrik Butir Beras
2	SNI ISO 6646:2011	Beras - Penentuan Potensi Rendemen Penggilingan Gabah dan Beras Pecah Kulit
3	SNI 9303:2024	Benih Kacang Tanah
4	SNI 9304:2024	Produksi Benih Kacang Tanah
5	SNI 9305:2024	Produksi Benih Ubi Kayu
<i>Bidang Hortikultura</i>		
6	SNI 7002:2024	Benih Umbi Kentang (<i>Solanum tuberosum</i> L.) Kelas Benih Sebar (G2)
7	SNI 9280:2024	Bawang Bombai (<i>Allium cepa</i> L.)
8	SNI 3164:2024	Mangga
9	SNI 4482:2024	Durian
10	SNI 7990-1:2024	Anggrek pot - Bagian 1: <i>Dendrobium</i> Hibrida
11	SNI 7990-2:2024	Anggrek pot - Bagian 2: <i>Phalaenopsis</i> Hibrida
12	SNI 3165:2024	Jeruk Keprok
<i>Bidang Perkebunan</i>		
13	SNI 3393:2024	Jahe Kering sebagai Revisi dari SNI 01-3393-1994 Jahe Kering
14	SNI 7953:2024	Kunyit sebagai Revisi dari SNI 7953:2014 Kunyit
15	SNI 7162:2024	Benih Tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) sebagai revisi dari SNI 01-7162-2006 Benih Tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)
16	SNI 7159:2024	Benih Wijen (<i>Sesamum indicum</i> L.) sebagai revisi dari SNI 01-7159-2006 Benih Wijen (<i>Sesamum indicum</i> L.) - Kelas benih dasar (BD), Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR)
17	SNI 7157:2024	Benih Kelapa Dalam (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>typica</i>) sebagai revisi dari SNI 01-7157-2006 Benih Kelapa Dalam (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>typica</i>)
18	SNI 7158:2024	Benih Kelapa Genjah (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nana</i>) sebagai revisi dari SNI 01-7158-2006 Benih Kelapa Genjah (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nana</i>)
19	SNI 9272:2024	Benih Kakao (<i>Theobroma cacao</i> L.) dalam bentuk biji
20	SNI 9333:2024	Benih Kopi Robusta (<i>Coffea canephora ex froehner</i>) asal cabang artotrop
<i>Bidang Peternakan</i>		
21	SNI 9309:2024	Bibit Kelinci New Zealand White Indonesia
22	SNI 4868-1:2024	Bibit Niaga (Final stock) umur sehari/Kuri (Day Old Chick) - Bagian 1: Ayam Ras Tipe Pedaging sebagai revisi dari SNI 4868-1:2019 Bibit Niaga (Final stock) umur sehari/Kuri (Day Old Chick) - Bagian 1: Ayam Ras Tipe Pedaging
23	SNI 7880:2024	Embrio Ternak sebagai revisi dari SNI 7880.1:2013 Embrio Ternak - Bagian 1: SAPI
24	SNI 7352-8:2024	Bibit Kambing - Bagian 8: BOEP
25	SNI 9316:2024	Benih Setek Rumput Gajah (<i>Pennisetum purpureum</i>)
26	SNI 9261:2024	Bahan Pakan dan Pakan - Metode Pengambilan contoh
27	SNI 9315:2024	Benih <i>Indigofera zollingeriana</i>
28	SNI 9336:2024	Vaksin Rabies inaktif untuk hewan



No	NO SNI	JUDUL SNI
<i>Bidang Sumber Daya Lahan Pertanian</i>		
29	SNI 8473:2024	Spesifikasi informasi geospasial - survei dan pemetaan tanah semidetil skala 1:50.000 sebagai revisi dari SNI 8473:2018 survei dan pemetaan tanah semidetil skala 1:50.000
30	SNI 7925:2024	Spesifikasi informasi geospasial - survei dan pemetaan lahan gambut skala 1:50.000 sebagai revisi dari SNI 7925:2019 Pemetaan lahan gambut skala 1:50.000
31	SNI 9302:2024	Spesifikasi informasi geospasial - sumberdaya agroklimate untuk penentuan pola tanam tanaman pangan skala 1:250.000
32	SNI ISO 25177:2019	Kualitas Tanah - Deskripsi Tanah di Lapangan (Ditetapkan oleh BSN Tahun 2024)
33	SNI ISO 23646:2022	Kualitas Tanah - Penetapan Pestisida Organoklorin melalui Kromatografi Gas dengan Detektor Selektif Massa (GC/MS) dan Kromatografi Gas dengan Deteksi Penangkap Elektron (GC-ECD)
34	SNI 9292:2024	Metode perhitungan kebutuhan air tanaman di lahan kering
35	SNI 9281:2024	Pengaturan Air pada Tata Air Mikro di Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tipe Luapan B
36	SNI 9282:2024	Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith) pada Tanaman Jagung
<i>Bidang Alat dan Mesin Pertanian</i>		
37	SNI 7606:2024	Mesin pencampur Horizontal Bahan Pupuk Organik dan Pakan Ternak Tipe Pengaduk Ribbon - Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai revisi dari SNI 7606:2010 Mesin Pencampur Bahan Pupuk Organik Tipe Auger Horizontal - Syarat Mutu dan Metode Uji
38	SNI 7785:2024	Mesin Pencacah Hijauan Pakan Ternak - Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai revisi dari SNI 7785.1:2013 Mesin Pencacah Hijauan Pakan Ternak - Syarat Mutu dan Metode Uji - Bagian 1: Tipe Vertikal
39	SNI 8464:2024	Mesin Panen Jagung Kombinasi - Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai revisi dari SNI 8464:2017 Mesin Panen Jagung Kombinasi Tipe Reel (Reel Type Corn Combine Harvester) - Syarat Mutu dan Metode Uji
40	SNI 8755:2024	Mesin Kombinasi Nasional Multikomoditas - Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai revisi dari SNI 8755:2019 Mesin Panen Multi Komoditas (Padi, Jagung, dan Kedelai) - Syarat Mutu dan Metode Uji
41	SNI 8226-2:2024	Mesin Pengolahan Gabah - Bagian 2: Mesin Pengupas Gabah Rol Karet sebagai revisi dari SNI 02-0833:1989 Mesin Pengupas Gabah Rol Karet, Cara Uji Unjuk Kerja
42	SNI 7603:2024	Mesin Sortasi Biji Kopi tipe Meja Getar - Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai revisi dari SNI 7603:2010 Mesin Sortasi Biji Kopi Tipe Meja Getar - Unjuk Kerja dan Metode Uji
43	SNI 7597:2024	Mesin Pengering Biji-Bijian Tipe Sirkulasi - Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai revisi dari SNI 7597:2018 Mesin Pengering Biji-Bijian - Tipe Sirkulasi - Syarat Mutu dan Metode Uji



No	NO SNI	JUDUL SNI
44	SNI 8886:2024	Mesin Pengering Biji-Bijian Mobile Tipe Sirkulasi -Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai revisi dari SNI 8886:2020 Mesin Pengering Mobile Tipe Sirkulasi untuk Padi, Jagung, dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji
45	SNI 9299:2024	Mesin Angkut untuk Hasil Perkebunan dan Pertanian - Syarat Mutu dan Metode Uji
46	SNI 7697:2024	Prosedur Pengambilan Contoh Uji Alat dan Mesin Pertanian sebagai revisi dari SNI 7697:2011 Prosedur Pengambilan Contoh Uji Alat dan Mesin Pertanian
47	SNI 9298:2024	Pertanian Presisi - Irigasi Presisi - SYarat Mutu dan Metode Uji
48	SNI 7605:2024	Bangunan Pertanian - Rumah Kasa - Syarat Mutu dan Metode Uji sebagai Revisi dari SNI 7605:2010 Bangunan Pertanian - Syarat Mutu dan Metode Uji Rumah Kasa
<i>Bidang Pascapanen Pertanian</i>		
49	SNI 7313:2008	Batas Maksimum Residu Pestisida pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan sebagai revisi dari SNI 7313:2008 Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian
50	SNI 9306:2024	Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi (<i>Oryza sativa</i> L.)
51	SNI 9279:2024	Pedoman Proses Pascapanen Daun Talas Beneng (<i>Xanthosoma Undipes</i> K. Koch)
52	SNI 9289:2024	Pedoman Proses Pascapanen Bawang Merah (<i>Allium cepa</i> var. <i>ascalonicum</i> syn <i>allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>) Konsumsi
<i>Bidang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian</i>		
53	SNI ISO 21571:2005	Bahan Pangan - Metode Analisis untuk Deteksi Produk Rekayasa Genetik dan Produk Turunannya - Ekstraksi Asam Nukleat
54	SNI 9254:2024	Pengelolaan Bank Gen Biji Ortodoks





**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550

Telp. (021) 780 4055, Fax (021) 780 4237
www.pertanian.go.id

